



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Edisi 45 Tahun 2023

W A R T A A N G G A R A N

MAJALAH KEUANGAN PUBLIK

Rapor APBN 2023 Semester I:

Performa OK untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia



“

Salah satu fakta unik tentang media sosial adalah bahwa lebih dari setengah penduduk dunia, atau lebih dari 4 miliar orang, aktif menggunakan platform-platform media sosial. Ini menjadikannya salah satu fenomena teknologi paling cepat dalam sejarah manusia. Dengan begitu banyak orang yang terhubung melalui media sosial, platform ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi.

”

**Follow us
@DitjenAnggaran**





DAFTAR ISI

- 4 Lintas Peristiwa
- 6 Eksposur
- 9 Dari Anggaran

LAPORAN UTAMA

- 11 Rapor APBN Semester I Tahun 2023: Performa Apik, Ekonomi Membaik
- 15 Strategi Lolos Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
- 19 Naik Kelas Indonesia ke Dalam “Negara Berpendapatan Menengah Ke Atas”: Pijakan Awal Menuju Indonesia Maju 2045
- 23 Rapor Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023 Transfer ke Daerah

OPINI

- 29 Menelisik Kinerja *Subholding Upstream* Pertamina 2022
- 34 Akses Pembiayaan yang Mudah dan Menguntungkan bagi Petani melalui Skema Subsidi Resi Gudang
- 37 Peran APBN dalam Program/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 41 Upaya Peningkatan Potensi PNBPN Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara

PERATURAN

- 47 PMK 62 Tahun 2023, Penyempurnaan dan Simplifikasi Regulasi Tata Kelola Keuangan Negara

LIFE STYLE

- 50 *Thrift Shop and It's Controversy*

TRAVELING

- 53 Pendakian Gunung Ciremai: Sebuah Catatan Perjalanan

POJOK PUISI

- 60 Asa Dalam Rasa



Foto: A. Tamzis Hudi

Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Redaktur : Mega Meilistya, Akhmad Tamzis Hudi, Angling Nugroho K, Muhammad Mansur Chisni, Bektu Sellia Cahyani, Niken Ajeng Lestari, Heru Winarto, Abdurrahman Imam P, Andri Sukmana.
Penyunting/editor : Regita Triastika, Ijlal Mochamad Ready N.
Desain Grafis/Photografer : Afif Mifta Khoiriza, Trio Kurnia D, Muchamad Irfan.
Sekretariat : Fitri Anggreni.
Alamat Redaksi : Gedung Sutikno Slamet Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021)3866117 pst. 8009. E-mail : ortaladja@kemenkeu.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Find Us On:



Ditjen Anggaran



ditjenanggaran



Ditjen Anggaran



DitjenAnggaran



Ditjen Anggaran



Ditjen Anggaran



8
Juni
2023

Kunjungan Lapangan Tim Monitoring Program JKN Reform PforR di Fasilitas Kesehatan di Denpasar

Sejalan dengan Program JKN Reform PforR, Bank Dunia konsisten membantu pemerintah Indonesia mengembangkan kualitas layanan JKN.

Dalam rangka monitoring penyelesaian beberapa proyek dalam program tersebut, pada Kamis, 8 Juni 2023, Bank Dunia didampingi oleh empat unit pemangku utama JKN, yaitu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN dan Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke di Puskesmas II Denpasar Barat, RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, dan BPJS Kesehatan Bali.

27
Juni
2023

Media Briefing Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Anggaran: Wujudkan Simplifikasi Tata Kelola Keuangan Negara

Guna mendorong penyederhanaan tata kelola keuangan negara, Kementerian Keuangan menyusun PMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. PMK tersebut disusun dengan menggabungkan 29 regulasi terkait yang ada saat ini. Penggabungan materi muatan ke dalam PMK ini dilakukan dengan memasukkan materi muatan baru, mengubah materi muatan, dan mencabut peraturan *eksisting* yang terkait. PMK ini ditetapkan sekaligus untuk melakukan penyempurnaan aturan terkait tata kelola keuangan negara yang terdiri dari: pendekatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

MEDIA BRIEFING

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP

12 Juli
2023



Media Briefing PP Nomor 19, 20, 21, 28 Tahun 2023

Dalam rangka mengoptimalkan PNBP di lingkungan Kementerian Sosial, KPPU, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Nomor 19 tahun 2023 (Kemensos), Nomor 20 (KPPU), Nomor 21 (Kemen PUPR), dan Nomor 28 (Kementan). Penyusunan PP ini dilakukan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh potensi PNBP baru, jenis dan tarif atas jenis PNBP yang sederhana, pemberian tarif tertentu kepada pihak yang membutuhkan layanan, serta penyesuaian terhadap besaran tarif PNBP yang berlaku pada peraturan sebelumnya. Untuk menyosialisasikan PP tersebut ke kalangan awak media, telah diselenggarakan *media briefing* yang berlokasi di Jakarta dan Jatiluhur.



7 Agustus
2023

Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024

Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, proses perencanaan dan perumusan APBN membutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik. Perspektif publik sangat dibutuhkan sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi *good governance* dan penguatan partisipasi publik dalam penyusunan RUU APBN TA 2024 yang semakin lebih kredibel dan transparan. Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN TA 2024 peran strategis APBN dalam menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global menuju penguatan ketahanan fiskal.



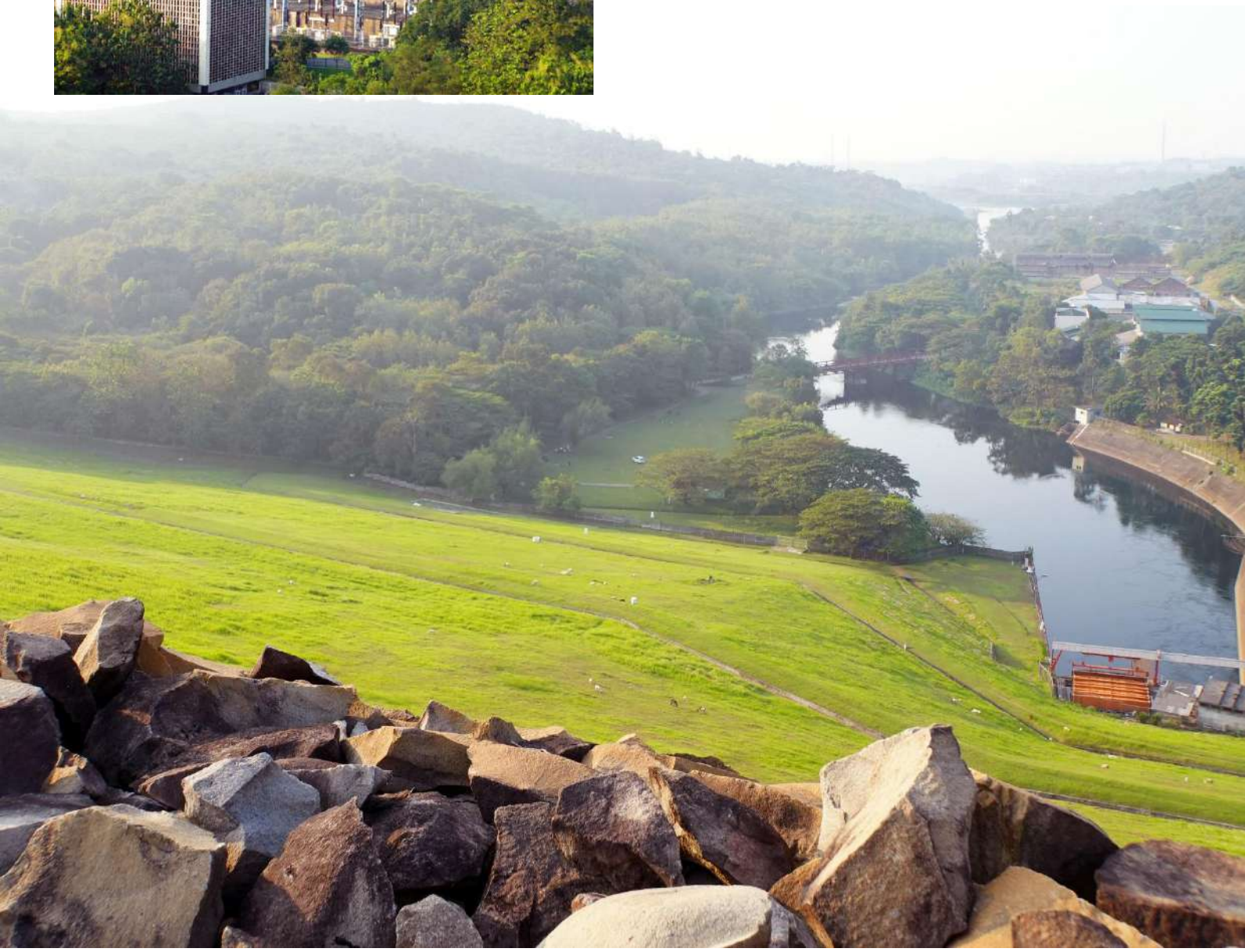
Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur Sumber PNBP dan Listrik untuk Masyarakat

Waduk Jatiluhur dengan kawalan bendungan megah dengan Ir. H. Djuanda berfungsi sebagai pemasok air baku dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat, serta mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 187 megawatt. Waduk Jatiluhur membendung aliran Sungai Citarum dengan luas daerah aliran sungai mencapai 4.500 km persegi, merupakan salah satu pengelolaan SDA terbesar yang dihadapi oleh PJT II.





Bendungan Waduk Jatiluhur telah beroperasi sejak 1967 dan pembangunannya menghabiskan dana sebesar US\$230 juta. Nama bendungan ini diambil dari nama Ir. H. Djuanda, yang berjasa dalam membiayai pembangunan konstruksi Bendungan Jatiluhur. Beliau adalah Perdana Menteri RI terakhir dan pernah memimpin kabinet Karya (1957–1959).





Dalam upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air yang menjadi cakupan layanan Kementerian PUPR, telah ditetapkan PP No. 21 Tahun 2023 yang salah satunya mengatur tentang Mitra Instansi Pengelola PNB. PJT II yang ditetapkan sebagai salah satu Mitra Instansi Pengelola PNB untuk membantu Kementerian PUPR dalam melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNB tentang pengelolaan air dan pengelolaan aset pemerintah yang diserahkan di Waduk Jatiluhur untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat.





Laporan Semester menjadi alat untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja APBN, serta merencanakan langkah-langkah peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaannya. Perkembangan

perekonomian Indonesia pada Semester I 2023, meskipun penuh ketidakpastian, angka *Purchasing Managers' Index* (PMI) dan indikator ekonomi lainnya menunjukkan perbaikan yang positif. Di tengah aktivitas manufaktur global yang masih mengalami kontraksi, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada triwulan I.

Pendapatan negara pada Semester I 2023 mencapai Rp1.407,91 triliun atau 57,2 persen dari target, meningkat dari tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan meningkat 5,4 persen dari tahun sebelumnya, sementara penerimaan PNPB juga mengalami kenaikan. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari pagu, dengan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden memberikan arahan terkait Laporan Semester I 2023, khususnya mengenai perhatian pada kebijakan APBN yang antisipatif, belanja yang berkualitas, antisipasi musim kemarau dan kebakaran hutan, serta stabilitas politik dan keamanan selama tahapan pemilu 2024. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam rangka meraih pertumbuhan positif.

Kinerja APBN Semester I 2023 menunjukkan tren positif dalam perekonomian Indonesia. Penanganan yang baik terhadap APBN menjadi faktor penting dalam meredam dampak ketidakpastian ekonomi global. Kembali masuknya Indonesia sebagai *upper middle income country* serta capaian lainnya menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, dan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Redaktur

Mohon untuk tidak memberi/menerima imbalan, hadiah atau segala bentuk pemberian/penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika anda mengetahui adanya pelanggaran terkait gratifikasi ilegal atau suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Anggaran, segera laporkan melalui Saluran Pengaduan berikut:

Call Center : 14090 ext.2 (layanan ke 2)

E-mail : pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

WhatsApp : 0811-1646-116 (hanya chat)

Aplikasi : www.wise.kemenkeu.go.id

Situs Web : www.lapor.go.id

Kotak Pengaduan : Gd. Sutikno Slamet

Dukung DJA mempertahankan
Predikat ZI-WBK dengan

TOLAK GRATIFIKASI

www.anggaran.kemenkeu.go.id



RAPOR APBN SEMESTER I TAHUN 2023: PERFORMA APIK, EKONOMI MEMBAIK

Angling N. Kemenangan

Dit. Penyusunan APBN

Laiknya pelajar yang menerima rapor pada setiap akhir semesternya, kinerja APBN pada semester I setiap tahunnya juga dinilai dengan apa yang dinamakan Laporan

Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama (Laporan Semester). Rapor APBN dalam Laporan Semester tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisa, evaluasi menyeluruh, dan menyusun rencana tindak lanjut peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan APBN





Dalam Laporan Semester I tahun 2023, secara keseluruhan performa APBN menunjukkan kinerja yang cukup apik. Kondisi perekonomian nasional semakin membaik, tercermin dari angka *Purchasing Managers' Indeks* (PMI) manufaktur yang terus berada di *level* ekspansif, terkendalnya inflasi, Indeks Keyakinan Konsumen yang menguat, dan terus tumbuhnya sektor konsumsi. Kondisi tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian dan tertahannya pemulihan ekonomi global.

Aktivitas manufaktur global masih berada di level kontraksi. PMI manufaktur global hanya berada di level 50, yang dipengaruhi oleh pelemahan aktivitas sektor manufaktur di Amerika Serikat dan kawasan Eropa. PMI sendiri adalah indikator yang menggambarkan aktivitas dan seberapa optimis perekonomian suatu negara. Salah satu PMI yang sering menjadi perhatian investor dan analis adalah PMI manufaktur. Apabila indeks PMI manufaktur di atas 50, maka sektor manufaktur negara tersebut sedang berada pada *level* ekspansi atau tumbuh. Sebaliknya apabila indeks berada di bawah 50, sektor tersebut sedang mengalami kontraksi atau perlambatan dan indikator bahwa permintaan konsumen sedang melemah. Pelemahan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian suatu negara, maupun penutupan pabrik yang berdampak pada meningkatnya pengangguran.

Di tengah kondisi ketidakpastian tersebut, persepsi terhadap kinerja perekonomian Indonesia terus membaik. Inflasi domestik yang terkendali, terutama bahan pangan, memberikan dukungan terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan semakin meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. Selain itu, dukungan sektor keuangan yang masih kuat, baik di perbankan maupun pasar modal, berdampak pada berlanjutnya tren positif di pasar keuangan dan SBN. Kondisi tersebut mendorong kinerja perekonomian nasional mencapai 5,3 persen pada triwulan I tahun 2023 atau tumbuh di atas 5 persen pada enam kuartal berturut-turut yang menunjukkan solidnya perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan inklusif, juga tercermin dari semakin turunnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta pemulihan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, Indonesia telah kembali masuk menjadi *upper middle income country* yang akan menjadi langkah pijakan penting dalam menuju visi Indonesia maju tahun 2045.

Semakin membaiknya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari performa apik APBN. Performa apik APBN semester I tahun 2023 terlihat dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.407,91 triliun (57,2 persen dari target), lebih tinggi Rp71,8 triliun dari periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.105,6 triliun atau meningkat 5,4 persen dibandingkan tahun 2022. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau meningkat 9,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh implementasi UU HPP, aktivitas produksi dan konsumsi, serta masih tingginya harga komoditas. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 persen dari target, yang antara lain dipengaruhi kenaikan bea masuk akibat menguatnya nilai tukar dolar AS, peningkatan rata-rata bea masuk, dan *extra effort* penelitian ulang dokumen impor dan audit kepabeanan. Adapun kontributor utama bea masuk berasal dari komoditas kendaraan, suku cadang kendaraan, besi dan baja dasar, serta barang modal berupa mesin untuk kepentingan pertambangan, penggalan, dan konstruksi.

Sementara itu, penerimaan PNBP mencapai Rp302,1 triliun (65 persen dari target) atau meningkat 5,5 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut dikontribusikan oleh setoran dividen BUMN dan PNBP SDA nonmigas sebagai dampak tingginya harga komoditas dunia, terutama minerba. Pendapatan SDA migas mencapai Rp60,1 triliun (45,8 persen dari target), sedangkan pendapatan SDA nonmigas mencapai Rp78,3 triliun (120,8 persen dari target) atau meningkat 94,7 persen yang dikontribusikan oleh pendapatan SDA pertambangan minerba, kehutanan, dan panas bumi. Pendapatan PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencapai Rp42,4 triliun (86,3 persen dari target) atau tumbuh 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kenaikan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN perbankan dan beberapa BUMN lainnya seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Jasa Marga Tbk., dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Adapun pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp83,0 triliun (73,2 persen dari target), yang dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan PNBP K/L sebesar 4,7 persen dari pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, jasa transportasi, serta layanan pertahanan. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp38,4 triliun (46,3 persen dari target), yang dikontribusikan oleh pendapatan



Laporan Utama

beberapa BLU di bawah Kemenkes, Kemenkominfo, Kemenhan, Kemenag, Polri, BP Batam, Kemenhub, dan KemenESDM. Sementara itu, pendapatan pengelolaan dana perkebunan sawit dan pendapatan BPJS Kesehatan mengalami reduksi. Adapun penerimaan hibah mencapai Rp0,15 triliun yang dikontribusikan oleh hibah luar negeri terencana.

Realisasi Belanja Negara pada semester I tahun 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun (41 persen dari pagu) atau lebih tinggi 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 71 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 29 persen. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp891,6 triliun (39,7 persen dari pagu) atau meningkat 1,6 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp877,2 triliun. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja non-K/L sebesar Rp474,4 triliun

(38,1 persen dari pagu) atau turun 1,9 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp483,4 triliun. Belanja non-K/L tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi.

Selanjutnya, realisasi belanja K/L mencapai Rp417,2 triliun (41,7 persen dari pagu) atau meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp393,8 triliun. Realisasi belanja K/L tersebut dikontribusikan oleh kenaikan realisasi belanja pegawai (11,1 persen), belanja modal (8,3 persen), belanja barang (2,0 persen), dan bantuan sosial (3,4 persen). Belanja K/L tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, BOS (Kemenag), bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, serta pembayaran gaji dan tunjangan.



Sejalan dengan arahan Presiden pada sidang paripurna tentang Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 dalam rangka melanjutkan tren performa yang positif di tahun 2023, maka terdapat beberapa hal harus menjadi fokus perhatian pemerintah antara lain, pertama, kebijakan APBN harus terus didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta memastikan pertumbuhan ekonomi terus positif. Pemerintah harus membuat berbagai skenario, termasuk kemungkinan skenario terburuk untuk mengantisipasi berbagai risiko perekonomian global yang dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri, terutama risiko yang berasal dari sektor keuangan, kenaikan utang, perang Rusia-Ukraina, fragmentasi ekonomi, masih tingginya tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama (*higher for longer*). Pemerintah harus terus memperkuat reformasi fiskal seperti efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penguatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi dan menyusun proyeksi yang akurat agar pendapatan negara tidak terganggu. Pemerintah juga perlu diberikan fleksibilitas untuk melakukan langkah-langkah antisipatif yang dibutuhkan dalam rangka menjaga stabilitas dan kekondusifan perekonomian dalam negeri.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat fundamental perekonomian bangsa adalah dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha industri dalam negeri serta menurunkan dominasi produk-produk impor. Untuk itu, belanja barang dan modal dalam APBN dan APBD hendaknya dapat diarahkan untuk memperkuat produk dalam negeri, agar pelaku usaha dalam negeri semakin lebih *proper* dalam meningkatkan daya saing produknya, serta mendapatkan jaminan pasar, khususnya dari instansi pemerintah. Kebijakan belanja perlu diarahkan pada peningkatan kualitas SDM (melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), percepatan pembangunan infrastruktur prioritas dan reformasi birokrasi, pengalokasian belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel, optimalisasi upaya hilirisasi sumber daya nikel dan kelapa sawit agar

semakin memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara masif. Selain itu, perlu melakukan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan pusat dan belanja daerah untuk penguatan akses, kualitas layanan publik, dan pencapaian target prioritas nasional, serta penerapan sistem yang terintegrasi untuk mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran daerah.

Ketiga, mengantisipasi potensi musim kemarau panjang akibat *el-nino*, serta potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi lokal dari berbagai komoditas pangan, mendorong konsumsi varietas yang berbeda, diversifikasi sumber makanan impor, mengurangi pemborosan makanan, serta perbaikan tata kelola mekanisme distribusi benih dan pupuk. Melalui berbagai langkah kebijakan tersebut, dampak *el-nino* diharapkan dapat diminimalisasi dan ketahanan pangan nasional tetap dapat terjaga, serta mendorong performa perekonomian nasional. Keempat, menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat pada tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu yang berjalan damai dan kondusif tentunya akan semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan, akan berdampak pada meningkatnya aliran investasi ke dalam negeri dan ekonomi dapat terus tumbuh positif.

Akhir kata, Confucius pernah berkata: *"kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh"*. Performa APBN semester I tahun 2023 semakin mempertebal optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan terus bangkit dan pulih, serta mampu terus melanjutkan pembangunan di tengah kondisi berbagai ketidakpastian situasi perekonomian dunia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan upaya serius pemerintah dalam mengelola APBN secara *prudent*, optimis, namun tetap penuh kewaspadaan. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan APBN mampu terus menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global menuju penguatan ketahanan fiskal. Kembali masuknya Indonesia sebagai *upper middle income country* juga merupakan salah satu capaian penting dalam menuju visi Indonesia Maju 2045, yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha.

.....

STRATEGI LOLOS JEBAKAN NEGARA BERPENGHASILAN MENENGAH

Lisno Setiawan,
Dit. Penyusunan APBN

Indonesia patut bergembira dengan kembalinya menapaki level sebagai negara berpenghasilan menengah atas.

Dengan memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 5.347,26 (tahun 2022), Indonesia sedikit lebih tinggi dari batas bawah negara berpenghasilan menengah atas yakni dengan GNI Per kapita (metode atlas) USD4.466



Dengan kembalinya di level negara berpenghasilan menengah atas, Indonesia menjaga asa untuk menggapai Indonesia Maju 2045 yang memproyeksikan Indonesia berada dalam level negara berpendapatan tinggi. Untuk saat ini, batas bawah negara berpenghasilan tinggi berada di kisaran USD13.845.

Berdasarkan data series, tidak banyak negara yang mampu lolos menjadi negara berpenghasilan tinggi. Dari tahun 1987 sampai dengan 2022, hanya terdapat 14 negara menengah yang mampu lolos di antaranya Antigua and Barbuda, Bulgaria, Chile, Guyana, St. Kitts and Nevis, Korea, Rep. Malta, Oman, Panama, Portugal, Rumania, Seychelles, Trinidad and Tobago, dan Uruguay. Selain itu, terdapat negara-negara yang sudah mendekati ambang batas negara berpenghasilan tinggi di antaranya China dan Malaysia.

Pelajaran dari Negara yang Mitra yang Lolos dan di Ambang Negara Berpenghasilan Tinggi

Untuk menggapai cita-cita tersebut, terdapat beberapa

Pada tahun 1999, Panama memegang kendali atas proyek strategis tersebut yang menghasilkan pendapatan negara yang sangat besar. Hal ini dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara baru meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Sebelum krisis global 2008, Panama mampu tumbuh dalam kisaran rata-rata 9,0 persen (2004-2008). Secara rata-rata 1987 sampai dengan 2022, tumbuh 4,73 persen.

Lain halnya dengan kisah sukses Chile. Sektor pertambangan menjadi primadona dengan ekspor tembaga yang melonjak di periode 1960-1970. Selanjutnya Reformasi ekonomi mulai 1980an dengan cara membuka pasar dan memprivatisasi industri, menarik investasi asing, berdampak pada pertumbuhan sangat tinggi. Memasuki Abad milenium, Chile berfokus dengan pengembangan sektor non-pertambangan seperti pariwisata, agrobisnis, teknologi, dan energi terbarukan. Upaya ini menjaga posisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Amerika Latin.

Secara rata-rata 1987 sampai dengan 2022, tumbuh 4,7 persen, dengan puncak pertumbuhan pada periode

1991-1997 yang mencapai rata-rata 7,7 persen.

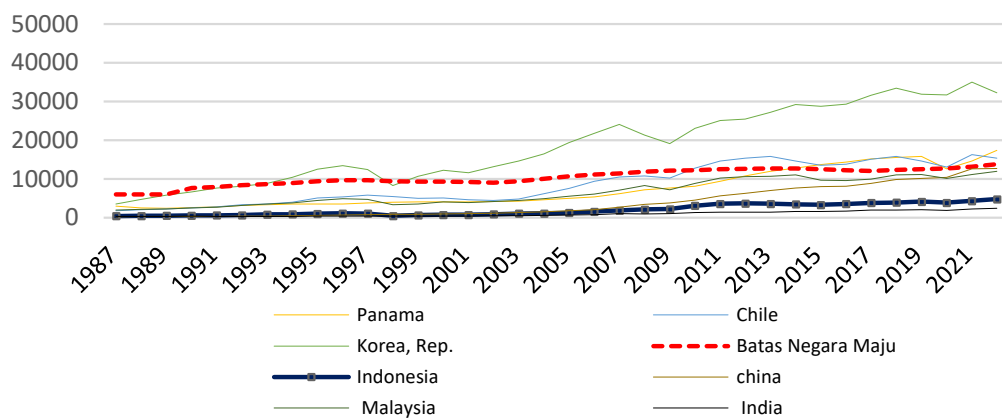
Kisah sukses dari negara Asia ditorehkan oleh Korea Selatan. Diawali dengan industrialisasi mulai tahun 1960 sampai dengan 1980 dengan dukungan besar pemerintah pada sektor manufaktur dan ekspor. Selanjutnya pengembangan dan riset membantu berdirinya perusahaan global seperti Samsung dan Hyundai di periode selanjutnya. Investasi dalam penelitian dan pengembangan dipertahankan sampai saat ini dengan

didukung Industri kreatif, seperti K-pop dan drama televisi yang juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan juga berperan dalam keberhasilan Korea Selatan menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat dan beragam. Secara rata-rata tahun 1987 sampai dengan 2022 tumbuh 5,4 persen. Sebelum krisis Asia (1998), pertumbuhan rata-rata mencapai 8,9 persen (periode 1987 sampai dengan 1997).

negara mitra terutama di kawasan selatan yang dapat dijadikan referensi, di antaranya Panama, Chile, dan Korea Selatan. Keberhasilan Panama sebagai pusat logistik dan perdagangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Amerika Latin. Panama mencapai puncak ekonomi melalui proyek strategis yang mencakup pembangunan Terusan Panama (1881-1914) yang merupakan kerjasama antara Panama dan Amerika Serikat.

Pembangunan Terusan Panama menghubungkan dua samudra dan mempercepat perdagangan dunia.

Pendapatan Per Kapita 1987-2022, Indonesia dan Negara Mitra (USD)



Sumber: World Bank



Sementara China meskipun sedikit terlambat *start*, namun saat ini tinggal sedikit lagi untuk berada dalam zona negara berpenghasilan tinggi. Saat ini, China menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Reformasi ekonomi yang dimulai tahun 1978 hingga saat ini membuka pasar dan mendorong investasi asing. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir, meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi seperti Shanghai dan Shenzhen menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Inisiatif Belt and Road (2013) juga membangun konektivitas internasional melalui investasi infrastruktur dan perdagangan. Secara rata-rata China, memiliki pertumbuhan 8,9 persen (periode 1987 sampai dengan 2022), tanpa mengalami kontraksi baik saat krisis Asia (1998), krisis keuangan global (2008), maupun krisis pandemi (2020).

Malaysia termasuk negara yang cukup lama berada dalam zona berpendapatan menengah. Namun demikian, pelan tapi pasti, Malaysia mampu mempersempit jarak kisaran 13,5 persen menuju batasan negara maju (2022). Pada

periode 1987, selisih sebesar 66,6 persen menuju batas negara maju. Malaysia mereguk pertumbuhan ekonomi melalui era pengembangan industri (tahun 1960 sampai dengan 1990) dengan berfokus pada sektor manufaktur, pertanian, dan pertambangan. Investasi dalam infrastruktur modern dimulai tahun 1990 dengan meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Investasi asing dan kebijakan pro-bisnis telah mendorong pertumbuhan sektor elektronik, manufaktur, dan layanan keuangan. Selain itu, Pariwisata menjadi sektor penting dengan upaya mempromosikan objek wisata dan fasilitas. Secara rata-rata, Malaysia tumbuh 5,7 persen (periode 1987 sampai dengan 2022). Dari beberapa negara di atas, negara yang berhasil lolos menjadi negara berpenghasilan tinggi adalah yang telah memiliki modal relatif tinggi GNI per kapita di atas USD1.700 pada tahun 1987. Sementara itu, China masih berkatut GNI per kapita sebesar USD 251,8 dan Indonesia pun masih berada di USD440 pada periode tersebut. Untuk melihat perkembangan indikator ekonomi makro negara-negara di atas serta Indonesia selama 3 dekade lebih dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Makro dan Fiskal, Indonesia dan Negara Mitra, 1987-2022

Negara Mitra	Status (2022)	GNI Per Kapita (USD)			Growth,% (1987-2022)	Populasi (juta jiwa- 2022)	Ekspor barang-jasa, %PDB (1987-2021)	FDI, %PDB (1987-2022)	Belanja Negara, %PDB (1987-2021)	Gross Capital, %PDB (1987-2022)
		1987	2022	CAGR (%)						
Panama	Tinggi	2.972,1	17.357,6	5,2	4,73	4,4	60,0	5,63	26,0	32,9
Chile	Tinggi	1.750,6	15.355,5	6,4	4,68	19,6	32,3	5,75	22,7	25,0
Korea Selatan	Tinggi	3.554,6	32.254,6	6,5	5,37	51,6	36,2	0,85	18,1	33,5
Indonesia	Menengah Atas	440,4	4.788,0	7,1	4,82	275,5	27,7	1,23	16,8	29,6
China	Menengah Atas	251,8	12.720,2	11,9	8,92	1.412,2	21,2	3,01	21,7	40,4
Malaysia	Menengah Atas	2.007,2	11.971,9	5,2	5,67	33,9	87,6	3,89	25,5	27,4

Sumber: World Bank dan IMF

catatan : Ekspor barang dan jasa mewakili nilai semua barang dan jasa pasar lain yang diberikan kepada seluruh dunia. Ini mencakup nilai barang dagangan, pengangkutan, asuransi, transportasi, perjalanan, royalti, biaya lisensi, dan layanan lainnya, seperti komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, bisnis, pribadi, dan layanan pemerintah. Tidak termasuk gaji karyawan dan pendapatan investasi (sebelumnya disebut sebagai layanan faktor) serta pembayaran transfer.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1987 s.d. 2022



Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Menuju Visi Indonesia 2045

Indonesia memiliki pertumbuhan kinerja yang cukup kuat di atas pertumbuhan rata-rata dunia terutama sejak perlambatan ekonomi global paskakrisis keuangan (2008). Kontraksi terjadi di saat pandemi, bahkan membuat Indonesia keluar dari zona pendapatan berpenghasilan menengah atas. Namun demikian, pemulihan ekonomi cepat bergulir, sehingga hanya dalam waktu dua tahun kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas.

Berdasarkan perbandingan data indikator ekonomi makro dan fiskal, Indonesia perlu terus melanjutkan dan mengeskalasi kemajuan ekonomi diantaranya sebagai berikut. Pertama, peningkatan investasi. Meskipun tergolong positif, FDI Indonesia secara rata-rata masih di bawah untuk negara-negara berpenghasilan tinggi maupun negara mitra seperti Malaysia dan China. Upaya peningkatan FDI ini sudah masuk dalam strategi jangka panjang pada kebijakan fiskal pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 yang berfokus pada penguatan SDM (*human capital*), *institutional reform*, dan *infrastructure gap*. Dari sisi efisiensi ekonomi, Indonesia justru mengalami penurunan sejak era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya *incremental capital output ratio* (ICOR) yang berada di atas 6 (periode 2014 sampai dengan 2022) terutama sejak era *commodity boom* berakhir 2012. Dengan demikian perlu, ditingkatkan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta menjaga sisi *market value*

dengan perbaikan tingkat konsumsi. Kedua, peningkatan ekspor baik barang maupun jasa. Hilirisasi SDA yang digulirkan pemerintah telah menjadi pijakan awal yang kuat untuk memulai manufaktur dan mendorong ekspor. Di sisi lain, peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi yang didukung UU Cipta Kerja akan meningkatkan nilai kompetitif dunia jasa termasuk pariwisata di Indonesia. Dengan peningkatan ekspor baik barang dan jasa akan meningkatkan kesehatan neraca perdagangan yang mendukung fundamental ekonomi yang kokoh.

Ketiga, peningkatan infrastruktur. Seiring pertumbuhan ekonomi yang meningkat paskakrisis keuangan global (2008), pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur yang ditandai dengan rasio *gross capital* periode 1987 sampai dengan 2022 yang dapat dijaga berkisar 29,6 persen PDB. Peningkatan tersebut seiring dengan dengan komitmen pemerintah yang akan meningkatkan porsi anggaran belanja negara dalam jangka menengah. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tetap menjaga kaidah fiskal terutama defisit anggaran yang di bawah 3 persen PDB. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal sehingga mobilisasi pendapatan negara dan penguatan belanja dapat dilakukan guna mendukung belanja termasuk infrastruktur secara nyata. Di sisi lain, perlu ditingkatkan proyek strategis yang memiliki nilai sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memberikan dampak *multiplier* masyarakat dalam jangka menengah-panjang.

.....



NAIK KELAS INDONESIA KE DALAM “NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH KE ATAS”: PIJAKAN AWAL MENUJU INDONESIA MAJU 2045

Angling N. Kemenangan
Direktorat Penyusunan APBN

Pada pembukaan sidang kabinet paripurna yang membahas laporan semester I pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara, 3 Juli 2023 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia telah naik kelas menjadi ada ada pembukaan sidang kabinet paripurna yang membahas laporan semester I pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara, 3 Juli 2023 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia telah naik kelas menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper-middle income countries*). Luar biasanya, capaian tersebut diraih justru di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami berbagai tekanan dan kondisi ketidakpastian.

Menurut Bank Dunia, *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai US\$4.580 atau melonjak sebesar 9,83 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar US\$4.170. GNI atau pendapatan nasional bruto (PNB) adalah jumlah total uang yang diperoleh oleh masyarakat dan pelaku usaha di suatu negara, yang mencakup produk domestik bruto (perkiraan nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu) ditambah dengan pendapatan dari luar negeri. GNI sendiri dianggap sebagai salah satu indikator yang paling akurat untuk mengukur kekayaan suatu negara.



Kenaikan GNI per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh kuat sebesar 5,3 persen pada tahun 2022, atau tertinggi sejak 2014. Yang lebih membanggakan, Indonesia terus dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan persisten di atas 5 persen dalam enam kuartal berturut-turut, justru di saat banyak negara yang mengalami kemerosotan cukup tajam akibat gejolak perekonomian dunia. Kondisi tersebut telah membuat Indonesia naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan menengah ke atas, setelah sempat terdegradasi di tahun 2020. Pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia sempat untuk yang pertama kalinya masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (GNI per kapita saat itu US\$4.070, dengan rentang *upper-middle* US\$4.046-US\$12.535). Namun, karena hantaman badai pandemi *Covid-19*, Indonesia dipaksa kembali turun ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income countries*). Kembali masuknya Indonesia ke dalam jajaran elit kelompok negara berpendapatan menengah ke atas merupakan proses yang terbilang cepat mengingat Indonesia baru saja terdegradasi di tahun 2020.

Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia ke dalam empat kelompok pendapatan, yakni pendapatan rendah (*low*), menengah bawah (*lower-middle*), menengah atas (*upper-middle*), dan pendapatan tinggi (*high*). Pembagian tersebut didasarkan pada nilai GNI per kapita, dan kriterianya diperbarui pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Adapun klasifikasi pendapatan negara menurut Bank Dunia per 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2024 adalah negara berpendapatan rendah US\$1.135 ke bawah, negara berpendapatan menengah ke bawah US\$1.146-US\$4.465, negara berpendapatan menengah ke atas US\$4.466-US\$13.845, dan negara berpendapatan tinggi sebesar US\$13.845 ke atas. Kelompok negara pendapatan menengah (*upper-middle* dan *lower-middle income countries*) merupakan representasi dari 75 persen populasi dunia dan sepertiga dari PDB global, serta merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kelompok negara tersebut memiliki dampak positif bagi seluruh dunia, misalnya dalam pengentasan kemiskinan, stabilitas keuangan internasional, permasalahan lintas batas global, perubahan iklim, pengembangan energi berkelanjutan, ketahanan air dan pangan, dan

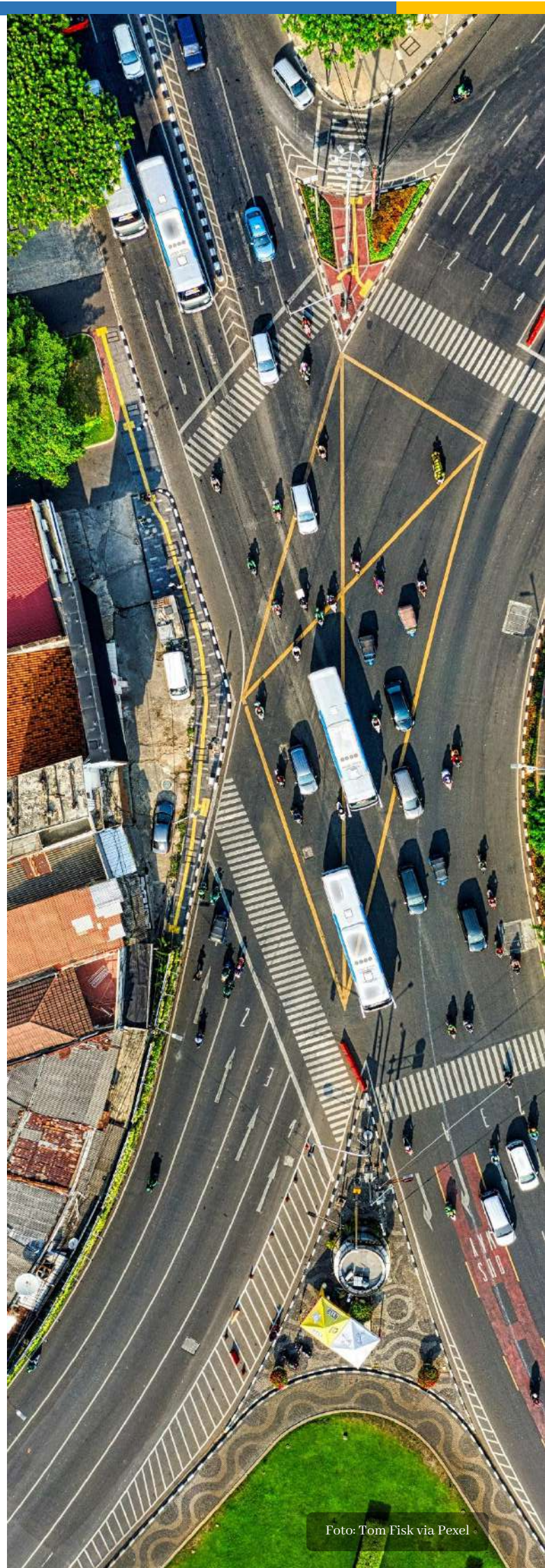


Foto: Tom Fisk via Pexel



perdagangan internasional. Adapun negara-negara yang termasuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi antara lain AS, Perancis, Jerman, Inggris, Australia, Arab Saudi, dan Uruguay.

Prestasi tersebut tidak terlepas dari upaya kerja keras Pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi sumber daya alam adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah SDA Indonesia melalui proses pengolahan SDA dalam suatu industri manufaktur (tidak langsung diekspor dalam bentuk komoditas murni). Hilirisasi SDA tersebut telah mampu mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia. Pemerintah juga senantiasa menjaga kualitas pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari terus menurunnya angka kemiskinan menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang telah mendekati level prapandemi. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih lebih cepat dan lebih kuat.

Pencapaian Indonesia yang masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas sudah sepatutnya kita syukuri. Kenaikan ini setidaknya mampu menjadi pijakan awal dalam menggapai cita-cita besar Indonesia mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 dan negara berpenghasilan tinggi sebelum 2045. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang tepat dan terukur dalam menuju peningkatan status berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus perhatian utama pemerintah, antara lain, pertama, pentingnya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola. Dengan masuknya Indonesia ke dalam jajaran negara pendapatan menengah ke atas, kepercayaan investor dan mitra dagang akan semakin meningkat. Peningkatan status diharapkan dapat mendorong daya saing ekonomi dan daya tarik investasi.

Hal tersebut akan membuat lapangan kerja menjadi semakin terbuka. Pemberantasan korupsi menjadi penting karena investor akan melihat apakah ekonomi Indonesia merupakan ekonomi biaya tinggi dan sejauh mana biaya logistik dan birokrasi yang harus dikeluarkan. Untuk itu, dibutuhkan pembenahan menyeluruh dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di percaturan global. Hal ini penting karena Indonesia telah menetapkan target untuk menarik investasi sebesar Rp1.400 triliun atau sekitar US\$93 miliar pada tahun 2023. Hingga kuartal pertama 2023, Indonesia telah mampu mengumpulkan investasi sebesar Rp328,9 triliun, di mana Rp177 triliun atau 53,8 persennya berasal dari luar negeri. Dibutuhkan penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan aktivitas investasi dan dunia usaha, sebagai kunci dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing. Pemerintah juga harus terus mengarahkan reformasi struktural sebagai dukungan percepatan transformasi ekonomi dan fokus pada sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan melalui pengembangan industri manufaktur dan kebijakan transisi energi hijau.



Kedua, komitmen peran APBN sebagai *shock absorber* dalam melindungi masyarakat di tengah dinamika perekonomian global. Kondisi perekonomian global yang masih tidak stabil akibat tensi geopolitik global berdampak perlambatan ekonomi dan menurunnya aktivitas perdagangan luar negeri, seperti menurunnya kinerja ekspor. Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global masih akan berlanjut di tahun 2023. IMF memperkirakan laju pertumbuhan perekonomian global hanya sebesar 2,8 persen, Bank Dunia 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga global yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2024, dikhawatirkan akan mendorong tingginya tingkat inflasi dunia, serta adanya fragmentasi perdagangan global. Untuk itu dibutuhkan komitmen APBN untuk terus berperan sebagai *shock absorber* melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi. Kebijakan APBN harus terus tetap didesain waspada, antisipatif, dan responsif sehingga APBN dapat melanjutkan perannya sebagai *shock absorber*.

Ketiga, perlu memperkuat fundamental perekonomian nasional agar tidak terjebak dalam *middle income country trap*. Agar tidak terjebak dalam *middle income country trap*, dibutuhkan berbagai strategi kebijakan, baik di bidang perlindungan sosial, pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, maupun belanja yang lebih berkualitas. Selain itu, dibutuhkan sinergi program perlindungan sosial dengan berbagai program pemberdayaan, peningkatan literasi, dan penguatan inklusi keuangan pada masyarakat prasejahtera agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan menurunkan tingkat kerentanan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah saat terjadi *shock* terhadap perekonomian. Pembangunan nasional diharapkan dapat semakin inklusif dan berkelanjutan serta dapat memberikan dampak bagi perbaikan indikator kesejahteraan sosial, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam jangka pendek, diharapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat berada di kisaran 5,3-6,0 persen, penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada kisaran 0,375-0,378 persen serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi berada di kisaran 73,31-73,49.

Keempat, perlu lebih bekerja keras (*extra effort*) agar pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung berkontribusi pada peningkatan per kapita.

Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka aktivitas perekonomian yang lebih luas akan tercipta sehingga lebih mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga. Namun sebaliknya apabila ekonomi tidak tumbuh atau melambat, maka lapangan kerja baru yang tercipta akan terbatas sehingga mempengaruhi pendapatan per kapita. Masyarakat akan kesulitan dalam meningkatkan pendapatan karena kurangnya peluang pekerjaan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita, seperti ketimpangan pendapatan, distribusi kekayaan yang tidak merata, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah terkait redistribusi pendapatan (subsidi dan pajak). Langkah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut telah ditempuh melalui kerja keras pembangunan guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten di atas 5 persen dalam enam kuartal berturut-turut. Namun demikian, untuk mencapai cita-cita besar Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 dan negara berpendapatan tinggi sebelum 2045, dibutuhkan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 6-7 persen secara konsisten.

Presiden Joko Widodo pernah berkata: “Untuk menjadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi”. Walaupun sempat terdegradasi di tahun 2020, saat ini Indonesia akhirnya mampu masuk kembali dalam jajaran kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Hal tersebut merupakan buah dari kesungguhan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Berbagai bauran kebijakan yang ditempuh untuk memulihkan ekonomi berhasil memberikan dampak positif dan harapan akan kemajuan berikutnya. Capaian tersebut sudah sepatutnya mempertebal optimisme, namun tetap waspada untuk menguatkan momentum pemulihan ekonomi dan menunjukkan bahwa potensi dan sumber daya saing nasional semakin berkembang. Kembali masuknya Indonesia sebagai *upper middle income countries* juga merupakan salah satu capaian penting dan pijakan awal dalam menuju visi Indonesia Maju 2045. Sebagai penutup, Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf tersohor dari Amerika pernah berkata: “*dare to live the life you have dreamed for yourself. Go forward and make your dreams come true*”. Beranilah menjalani kehidupan yang Anda impikan. Bergeraklah maju dan buatlah impian menjadi nyata.



Rapor Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2023 Transfer ke Daerah

Ahmad Nawawi
Dit. Penyusunan APBN

Tahun Pertama Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Layanan Publik, serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) telah ditetapkan pada tahun 2022 dan mulai efektif dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Tujuan dari UU HKPD adalah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan layanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi peraturan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan sinergi berbagai sumber daya nasional guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, salah satunya melalui peningkatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dengan berbagai sumber daya lainnya.

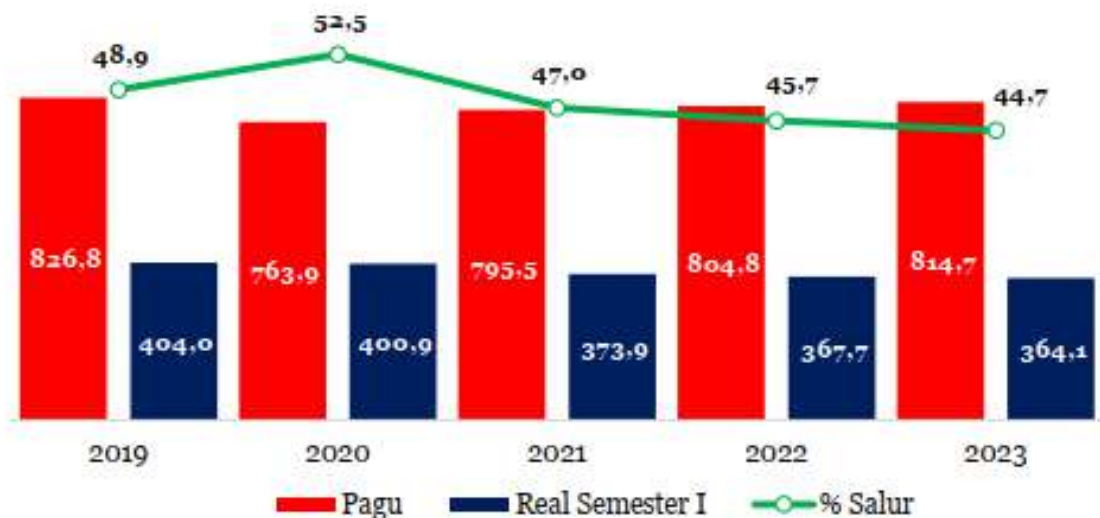
TKD merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sampai saat ini, TKD masih merupakan sumber pendanaan terbesar bagi APBD di

Indonesia, yaitu mencapai 64,75 persen pada tahun 2023 (sumber: Portal Data DJPK). Hal ini menunjukkan strategisnya TKD sebagai alat untuk pembangunan di daerah. Pada tahun 2023, TKD diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah. Sesuai dengan UU HKPD, komponen TKD terdiri dari DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Rapor Semester I Tahun 2023 Transfer ke Daerah

Realisasi TKD sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp364,1 triliun (44,7 persen terhadap pagunya). Kinerja TKD sampai dengan semester I tahun 2023 secara umum dipengaruhi oleh pencapaian pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dana TKD, yaitu persyaratan administrasi dan capaian kinerja. Rincian realisasi setiap komponen TKD dijelaskan berikut.

Realisasi Transfer ke Daerah Semester I, Tahun 2019-2023
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun 2023 (Kementerian Keuangan)

Mulai tahun 2023, pembagian DBH mempertimbangkan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah yang berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi. Hal ini dilakukan demi pemerataan pendapatan yang dibagihasilkan ke daerah. Selain itu, mulai tahun 2023 terdapat jenis DBH baru, yaitu DBH Perkebunan Sawit, yang peruntukannya telah ditentukan (*di-earmarked*) untuk pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan strategis atau prioritas lainnya sesuai kebijakan pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi DBH mencapai Rp51,4 triliun atau 37,7 persen terhadap pagunya. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi DBH Pajak sebesar Rp17,7 triliun (28,0 persen terhadap pagunya) dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp33,7 triliun (35,2 persen terhadap pagunya).

Mulai tahun 2023, DAU dibagi menjadi dua, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific purposes grant*). DAU yang ditentukan penggunaannya yaitu untuk pendanaan penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, pendanaan bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penyaluran DAU yang bersifat *block grant* dilakukan setiap bulannya sebesar 1/12 dari pagunya, sementara untuk DAU yang bersifat *specific purposes grant* dilakukan berdasarkan kinerja. Realisasi DAU sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp197,4 triliun

(49,8 persen dari pagunya). Realisasi DAU sampai dengan semester I tahun 2023 utamanya dipengaruhi pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran DAU, khususnya DAU yang bersifat *specific purposes grant*.

DAK Fisik diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan (*specific purposes grant*) untuk mendanai kegiatan khusus yang bersifat pembangunan fisik berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Realisasi DAK Fisik sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp5,1 triliun (9,5 persen terhadap pagunya). Realisasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh kecepatan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program/kegiatannya yang bersifat fisik, yaitu mulai dari lelang sampai dengan penyelesaian pembangunannya.

DAK Nonfisik juga merupakan salah satu bentuk TKD yang penggunaannya telah ditentukan. DAK Nonfisik diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik di daerah yang sifatnya nonfisik, antara lain untuk peningkatan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, UMKM, kepariwisataan, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, serta ketahanan pangan dan pertanian. Berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salurnya maka realisasi DAK Nonfisik sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp67,2 triliun (51,6 persen terhadap pagunya).

Hasil (Output) DAK Nonfisik Semester I Tahun 2023



Sumber: Dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun 2023 (Kementerian Keuangan)



Mulai tahun 2023, sesuai dengan UU HKPD, Hibah ke Daerah menjadi bagian dari TKD, di mana tahun sebelumnya merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat. Tujuan Hibah ke Daerah yaitu untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kinerja penyaluran hibah ke daerah sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp599,3 miliar (28,8 persen terhadap pagunya). Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan di daerah dan kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur dana hibah ke daerah.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada provinsi yang memiliki status otonomi khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dana Otsus diberikan untuk mendukung daerah otonomi khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraan, melalui program percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, serta peningkatan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Provinsi-provinsi di daerah Papua, selain menerima dana Otsus, juga menerima Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Kinerja realisasi dana Otsus dan DTI sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp4,6 triliun (26,7 persen terhadap pagunya), di mana realisasi tersebut dipengaruhi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen syarat salurnya.

Dana Keistimewaan (Danais) D.I. Yogyakarta diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Dana tersebut digunakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, tata pemerintahan, dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, serta melembagakan peran dan tanggung jawab kesultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Kinerja realisasi Danais D.I. Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp1,1 triliun (80,0 persen dari pagunya). Realisasi yang tinggi tersebut dikarenakan kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen syarat penyalurannya.

Dana Desa merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakat di desa. Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk



membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Realisasi Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp34,7 triliun (49,5 persen terhadap pagunya). Realisasi tersebut digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp4,3 triliun dan untuk non-BLT sebesar Rp30,3 triliun. Penggunaan non-BLT antara lain untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintahan desa, program kesehatan termasuk *stunting*, penyertaan modal pada BUMDes, dan program prioritas desa lainnya.

Terakhir, kebijakan Insentif Fiskal diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sebagai penghargaan atas kinerja yang baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Pemberian Insentif Fiskal dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) pemberian Insentif Fiskal kepada daerah yang berkinerja baik tahun sebelumnya; (2) pemberian Insentif Fiskal kepada daerah yang berkinerja baik tahun berjalan; dan (3) pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal yang berkinerja baik tahun sebelumnya. Kinerja realisasi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp2,0 triliun (25 persen terhadap pagunya).

Prognosis Semester II Tahun 2023 Transfer ke Daerah

Demi mendukung pembangunan dan peningkatan

Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Transfer ke Daerah, 2023 (dalam triliun rupiah)

URAIAN	2023						
	APBN	Realisasi Semester I	%	Prognosis Semester II	%	Outlook	%
1. Dana Bagi Hasil	136,3	51,4	37,7	109,6	80,5	161,0	118,2
2. Dana Alokasi Umum	396,0	197,4	49,8	190,6	48,1	388,0	98,0
3. Dana Alokasi Khusus	185,8	72,8	39,2	107,1	57,7	180,0	96,9
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,4	5,1	9,5	43,0	80,5	48,1	90,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,3	67,2	51,6	61,5	47,2	128,7	98,8
c. Hibah kepada Daerah	2,1	0,6	28,8	2,6	123,7	3,2	152,5
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	4,6	26,7	12,6	73,3	17,2	100,0
a. Dana Otsus dan DTI Provinsi-provinsi di Wilayah Papua	13,3	3,4	25,8	9,9	74,2	13,3	100,0
b. Dana Otsus Aceh	4,0	1,2	30,0	2,8	70,0	4,0	100,0
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,1	80,0	0,3	20,0	1,4	100,0
6. Dana Desa	70,0	34,7	49,5	35,3	50,4	69,9	99,9
7. Insentif Fiskal	8,0	2,0	25,0	5,8	73,0	7,8	98,0
TOTAL	814,7	364,1	44,7	461,4	56,6	825,4	101,3

Sumber: Dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun 2023 (Kementerian Keuangan)

Hai Sobat Anggaran

**LAGI MENCARI INFORMASI
TERKAIT PENGELOLAAN
PENGANGGARAN TERKINI??**

YUK CARI

PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 

[DOWNLOAD DI SINI:](#)





Menelisik Kinerja *Subholding Upstream* Pertamina 2022

Hellington
Direktorat PNBPN SDA & KND

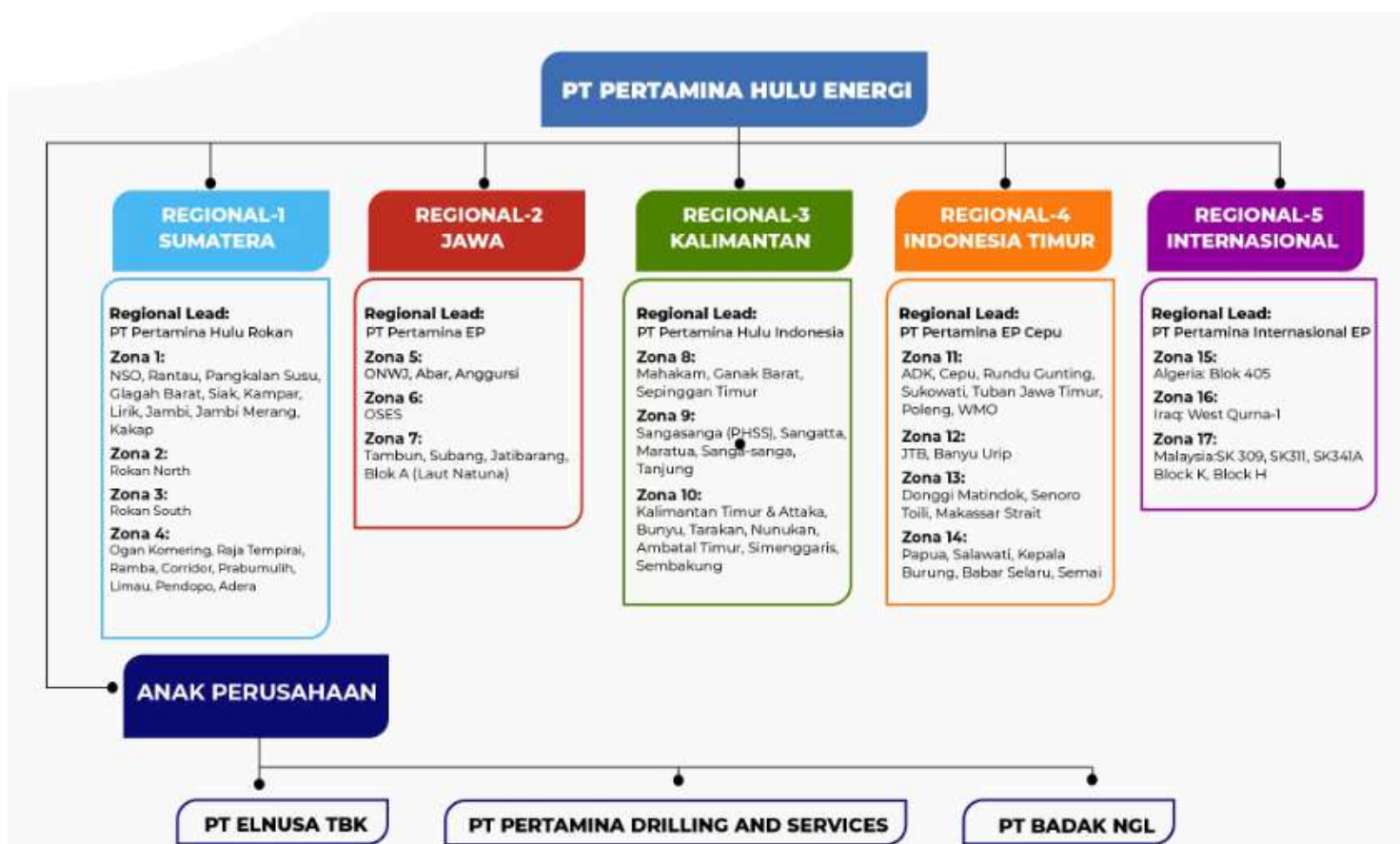
Menjadi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) kelas dunia merupakan visi dari PT Pertamina (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bisnis energi yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Ambisi Pertamina menjadi *Global Energy Champion* dengan *market value* mencapai USD100 miliar. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, antara lain Pertamina melakukan restrukturisasi usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu migas. Pertamina menunjuk PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) untuk mengelola *Subholding Upstream* yang dibentuk berdasarkan Surat Persetujuan Kementerian BUMN selaku RUPS No.S-467/MBU/06/2021 tanggal

30 Juni 2021. PT PHE dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Pedeve dengan kepemilikan masing-masing 99,9968% dan 0,0032%.

Dalam beberapa tahun terakhir kapasitas PT PHE semakin membesar dalam porsi *lifting* migas nasional antara lain diakibatkan beralih Wilayah Kerja (WK) terminasi ke pengelolaan PT PHE yang berasal dari lelang WK terminasi dan penugasan pemerintah. Contohnya, perolehan pengelolaan WK Rokan sebagai penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia semenjak 9 Agustus 2021.

PT PHE mengelola WK yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) regional. Struktur usaha PT PHE dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : situs PT PHE

Per 31 Desember 2022, PT PHE memiliki 68 anak perusahaan, dan 6 perusahaan *joint venture*. WK yang dikelola sebanyak 40 WK domestik, terdiri dari 23 blok operator dan 17 blok non-operator, dan 25 WK internasional, yang terdiri dari 1 operator, 2 non-operator yang dikelola pada 3 negara (meliputi Malaysia, Irak, Algeria), dan penyertaan modal pada 22 lapangan migas mancanegara.

Selama tahun 2022, PT PHE menghasilkan produksi migas mencapai 967,27 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 97% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 992,17 MBOEPD dengan rincian produksi minyak sebesar 514 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas bumi sebesar 453 MBOEPD. Capaian tersebut merupakan gabungan produksi dari lapangan domestik sebesar 804 MBOEPD, dan lapangan internasional sebesar 163 MBOEPD.

Sedangkan untuk realisasi *lifting* migas PT PHE tercatat sebesar 837,14 MBOEPD, atau 98% dari RKAP sebesar 850,54 MBOEPD. *Lifting* minyak mentah yang berasal dari WK domestik dan WK internasional sebesar 514 MBOPD atau 84% dari total *lifting* minyak Indonesia. *Lifting* rata-rata minyak mentah nasional sebesar 612 MBOPD, atau turun sekitar 7% dari tahun sebelumnya, dan 14% di bawah target tahun 2022 sebesar 703 MBOPD.

Lifting gas bumi di Indonesia juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian *lifting* pada tahun 2022 adalah sebesar 923 MBOEPD, di bawah target *lifting* pemerintah tahun 2022 sebesar 1.036 MBOEPD. Dari jumlah *lifting* PT PHE tersebut yang berasal dari WK domestik dan WK internasional mencapai rata-rata *lifting* sekitar 323 MBOEPD atau 35% dari total *lifting* Indonesia.

Tidak tercapainya target produksi dan *lifting* sebagaimana tercantum dalam RKAP antara lain diakibatkan adanya *gap* pada kegiatan pengeboran dari *delay* insentif WK dan kesiapan lokasi, termasuk akibat terjadinya *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas.

Pada tahun 2022, dalam kegiatan eksplorasi PT PHE berhasil merealisasikan penyelesaian pengeboran 17 sumur, penambahan sumberdaya 2C sebesar 345 Juta Barell Setara Minyak (MMBOE), dan 3 temuan *big fish* di

Manpatu-1X, Wilela-001 dan GQX GQ-GQS. Selain itu PHE juga berhasil menyelesaikan pengeboran sumur pengembangan sejumlah 689 dan 638 sumur *workover* serta realisasi tambahan cadangan 1P untuk migas dan gas sebesar 486 MMBOE atau 64% dari target tahun 2022.

Selama tahun 2022 untuk kegiatan produksi migas tersebut didukung alokasi biaya investasi sebesar USD6,09 miliar meningkat USD2,81 miliar atau 53,82% dari tahun 2021 sebesar USD3,28 miliar, sedangkan realisasi biaya investasi mencapai USD3,24 miliar atau meningkat USD0,66 miliar atau 25,42% dari tahun 2021 sebesar USD2,58 miliar. Kinerja penyerapan biaya investasi masih jauh di bawah alokasi yang disediakan.

Kinerja Keuangan

Per 31 Desember 2022 total aset PT PHE sebesar USD31,48 miliar naik 10,55% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD28,48 miliar. Liabilitas sebesar USD16,18 miliar atau naik 8,2% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD15,08 miliar, sedangkan ekuitas meningkat sebesar 13,19% dari USD13,39 miliar menjadi USD15,16 miliar.

Pada 2022, PT PHE membukukan pendapatan usaha USD16,18 miliar atau meningkat 37,85% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD11,74 miliar. Beban usaha meningkat 17,65% dari USD6,66 miliar menjadi USD8,51 miliar. Laba bersih USD4,67 miliar, atau naik 58,30% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD2,95 miliar. Kinerja tahun 2022 terutama disokong peningkatan kenaikan ICP yang menjadi USD97 per barel naik 42% dibandingkan ICP tahun 2021 yang sebesar USD68 per barel dan apresiasi kurs USD sebesar 4% menjadi Rp14.871 dibandingkan kurs 2021 yang sebesar Rp14.621. Capaian laba bersih 2022 mencapai 172,62% dari RKAP 2022 yang sebesar USD2,71 miliar

Capaian 2022 menghasilkan rasio profitabilitas *Gross Profit Margin* sebesar 47,41% dengan *Net Profit Margin* sebesar 28,88%, sedangkan *Return on Asset* sebesar 14,85% dan *Return on Equity* sebesar 30,84%.

Kontribusi kepada Negara

Berdasarkan informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT PHE tahun 2022, dari hasil *lifting* migas dan harga minyak dunia selama tahun 2022, PT PHE



memberikan kontribusi kepada penerimaan negara dalam bentuk pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara keseluruhan pembayaran pajak dan PNBP tahun 2022 sebesar USD8,6 miliar atau meningkat 64,41% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD5,27 miliar.

Realisasi kontribusi dari PNBP sebesar USD5,60 miliar, terutama berasal dari penjualan migas bagian negara yang berasal dari *lifting* di WK yang dikelola PT PHE. Sedangkan pajak sebesar USD3,07 miliar, yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan, PPh Badan, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan pajak lainnya.

Perhitungan PNBP sebagaimana disajikan dalam Laporan di atas tentunya belum memperhitungan *earning process* yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran dalam menghitung PNBP dari SDA Migas.

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan

Mengutip Laporan Keberlanjutan PT PHE Tahun 2022, Informasi Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan menggunakan kas basis berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

Nilai Ekonomi Yang Dihasilkan tahun 2022 sebesar USD15,58 miliar atau naik 37,67% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD11,32 miliar. Sedangkan Nilai Ekonomi Yang Didistribusikan kepada para

stakeholder sebesar USD11,99 miliar atau naik 94,41% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD6,16 miliar, terutama untuk pembayaran biaya operasi sebesar USD5,93 miliar dan pembayaran kepada investor dan *lender* sebesar USD4,87 miliar.

Secara total, Nilai Ekonomi Ditahan tahun 2022 sebesar USD4,19 miliar atau turun 24,72% dibandingkan tahun 2021 sebesar USD5,57 miliar. Selama tahun 2022, PT PHE mampu mengoptimalkan nilai ekonomi konsolidasian dari perolehan Pendapatan Usaha serta Laba Usaha hasil *lifting* migas kepada PT Pertamina (Persero) dan para *stakeholder* lainnya.

Prospek 2023

Mengutip informasi dalam Energia Weekly 17 Juli 2023 No. 28 Tahun LIX, hingga Mei 2023, PT PHE mencatatkan produksi migas sebesar 1.053 MBOEPD (100% dari target *year to date* Mei 2023) dengan rincian produksi minyak sebesar 572 MBOPD dan produksi gas 2.788 MMSCFD. Capaian ini didukung melalui penyelesaian rencana kerja pengeboran 6 sumur eksplorasi, 299 sumur pengembangan, 316 *workover* dan 13.257 *well services* menggunakan 69 *drilling rigs* dan 132 *WI rigs*. Realisasi produksi harian hingga Mei 2023 jauh melampaui realisasi produksi harian tahun 2022. Hal ini akan meningkatkan pendapatan usaha PT PHE.

Namun demikian, tantangan utama laju produksi migas berupa penurunan alamiah sumur-sumur



produksi yang semakin tua dan produktivitas yang semakin menurun. Selain itu, penurunan *lifting* minyak dan gas bumi juga dipengaruhi oleh terjadinya *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas. Faktor lain yang dapat memengaruhi capaian *lifting* migas adalah harga minyak mentah dimana kegiatan hulu migas akan meningkat di saat tinggi harga minyak mentah, dan tren rendahnya investasi dalam kegiatan eksplorasi migas.

Proyeksi ICP selama tahun 2023, dengan mengacu dokumen Laporan Pemerintah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2023, rata-rata ICP tahun 2023 diperkirakan pada kisaran US\$75 sampai dengan US\$80 per barel. Rendahnya perkiraan realisasi ICP tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tentunya akan menekan pendapatan usaha PT PHE.

Pergerakan harga minyak mentah dunia akan dipengaruhi berbagai faktor fundamental, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi penawaran, diperkirakan akan terjadi pengetatan pasokan minyak mentah didorong oleh pemotongan produksi minyak negara OPEC+ sebagai respons atas risiko *over supply* minyak global. Sedangkan dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi global diperkirakan menurunkan tingkat permintaan minyak mentah dunia.

Selain dari faktor fundamental, pergerakan harga minyak mentah dunia semester kedua tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh risiko konflik geopolitik, dan tingkat inflasi.

Pada 2023, Pertamina mencanangkan beberapa strategi penting dalam peningkatan kinerja antara lain optimalisasi kegiatan operasi (*operational optimization*), membuka nilai (*unlock value*) perusahaan, Inisiatif keberlanjutan (*Sustainability Initiatives*). *Unlock value* melalui seperti *strategic partnership*, (*initial public offering/IPO*), *Marger dan Acquisition*, *Equity Investment*.

Melihat kinerja tahun 2022, secara finansial posisi keuangan dan kinerja PT PHE dapat dikategorikan sangat kuat dan sehat. Pertamina sedang merancang IPO untuk melakukan penawaran umum saham perdana PT PHE, IPO ditujukan untuk mencari pendanaan untuk mendanai rencana ekspansi serta mencari mitra strategis (*strategic partner*).

Sehubungan dengan rencana IPO yang mengakibatkan kepemilikan Pertamina terdilusi maka laba bersih PT PHE akan didistribusikan kepada para pemegang saham publik melalui pembagian dividen. Dengan skema kepemilikan saat ini, dividen terlebih dahulu akan menjadi penerimaan Pertamina, negara akan mendapatkan dividen apabila Pertamina membagikan dividen. Sehingga ada risiko bagi penerimaan negara meski PT PHE membagikan dividen, negara tidak akan mendapatkan dividen jika Pertamina tidak membagikan dividen atau membagikan di bawah dividen yang diperoleh dari PT PHE. Mengacu pada informasi segmen usaha 2022 kinerja segmen usaha selain *Upstream* tidak sebaik kinerja *Upstream* sehingga bagian laba dari *Upstream* dapat terdistorsikan akibat kinerja segmen lainnya.

Perlu menjadi perhatian bahwa kinerja PT PHE sebagai hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan mendapat *privelege* dari negara, maka pembagian dividen dari PT PHE selayaknya dinikmati juga oleh negara, oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah negara harus memiliki langsung sebagian saham PT PHE sehingga akan menikmati dividen secara langsung, atau ada *covenant* yang mewajibkan Pertamina harus membagikan dividen kepada negara dari penerimaan dividen bagian Pertamina dari PT PHE.

Kabar baik dan mengembirakan pada 25 Juli 2023, PT Pertamina (Persero) melalui PT PHE telah menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell *Upstream Overseas Services (I) Limited* (SUOS) di Blok Masela. PT PHE bersama PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35% kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE nantinya akan mengelola 20% dan 15% akan dikelola oleh PETRONAS Masela.

Selesainya peralihan partisipasi *interest* Shell di Blok Masela menjadikan keberlanjutan Proyek Masela menuju titik terang untuk dapat dilanjutkan ke proses revisi *Plan of Development* (POD) yang diharapkan pada tahun 2029 bisa *onstream*.

Kepemilikan Blok Abadi Masela menjadikan prospek kinerja PT PHE semakin menjanjikan di masa yang akan datang.

.....



Akses Pembiayaan yang Mudah dan Menguntungkan bagi Petani melalui Skema Subsidi Resi Gudang

Viki Anggraini Soeprapto

Direktorat Penyusunan APBN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD

1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarga yang melakukan usaha tani di bidang pangan. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan petani,

Pemerintah memberikan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Pembiayaan SSRG memberikan pilihan untuk petani yang akan menahan menjual komoditas saat harga tidak optimal atau memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan volume komoditas, sehingga mampu mendorong dan meningkatkan kemampuan penyerapan dan untuk memantau stok pangan.

Pelaksanaan SSRG diatur dengan UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang melahirkan hak jaminan baru di Indonesia selain gadai, fidusia dan hipotek yaitu Hak Jaminan Resi Gudang, PP Nomor 36 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, PMK Nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, dan Permendag Nomor 53 tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2006, bahwa sistem pembiayaan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usaha terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit, dan amanat PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan di bidang Sistem Resi Gudang bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat membuka akses pembiayaan berbasis komoditas bagi petani, koperasi, maupun pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan aset yang dapat dijadikan agunan.

Sistem Resi Gudang atau SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. SSRG adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh penyalur SSRG kepada penerima SSRG dengan jaminan atau agunan berupa resi gudang dan diberikan subsidi bunga atau subsidi margin dari pemerintah. SSRG merupakan program penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada penerima SSRG guna menjaga kesinambungan produksi komoditas. SSRG diberikan untuk 20 komoditas yang dapat disimpan di gudang sesuai dengan Permendag Nomor 14 Tahun 2021 yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai. Sumber pendanaan SSRG berasal dari dana bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Risiko seluruhnya ditanggung oleh bank pelaksana. Kegiatan yang dapat didanai SSRG adalah usaha produktif dan resi gudang yang dapat digunakan sebagai agunan adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan di gudang dengan jenis komoditas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, mekanisme penyaluran kredit dapat dilakukan oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha produksi lain yang ditetapkan Menteri Perdagangan sebagai pemilik resi gudang. Penyaluran kredit dapat diberikan secara langsung atau secara

channeling. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu SRG, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan atau jatuh tempo resi gudang maksimal 1 tahun. Alur pelaksanaan SSRG adalah sebagai berikut, (1) pemilik barang membawa komoditas untuk disimpan ke gudang SRG yang dikelola pengelola gudang SRG dan sudah mendapat persetujuan Bappebti; (2) sebelumnya komoditas ditimbang oleh Lembaga Penilai Kesesuaian untuk mengetahui jumlah dan uji mutu. Apabila memenuhi, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengeloan barang yang berisi deskripsi barang dan barang yang diasuransikan; (3) pengelola gudang melakukan input pada sistem yang dikelola Pusat Registrasi.

Pusat Registrasi akan mengirimkan kode registrasi atau kode pengaman kepada pengelola gudang. Dengan kode tersebut, pengelola gudang dapat menerbitkan resi gudang. Kemudian, resi gudang diserahkan kepada pemilik barang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang SRG; (4) resi gudang dapat dijadikan agunan ke bank atau lembaga keuangan nonbank untuk memperoleh pembiayaan atau dijual secara langsung kepada pihak lain atau cukup disimpan sebagai tanda kepemilikan barang.

Pada tahun 2023, pagu Subsidi SSRG ditetapkan sebesar Rp2,3 miliar. Sampai dengan 30 Juni tahun 2023, masih belum terdapat realisasi SSRG dikarenakan proses pembayaran Subsidi yang masih terkendala administrasi yakni kurangnya dokumen persyaratan dan proses integrasi fitur SSRG di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Penerima manfaat SSRG tahun 2023 adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi pemilik resi gudang yg bergerak di sektor pertanian sebesar 988 debitur yang tersebar di 17 provinsi, dengan rincian pada provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

SSRG mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya (1) dari sisi petani, pengetahuan petani tentang SRG atau SSRG terbilang masih kurang; saat ini petani lebih memilih menjual produknya secara langsung; tidak ada jaminan harga komoditas dapat naik pada saat jatuh tempo; prosedur

pengajuan kredit yang sangat rumit dan tidak ada kepastian kapan dilakukan pencairan dana; petani tidak lolos SLIK karena kreditnya yang bermasalah; dan petani sudah memiliki keterikatan dengan pelaku ijon; status peserta SSRG belum dapat dipastikan; (2) dari sisi gudang, jumlah gudang SRG di tiap-tiap provinsi tidak pasti, kapasitas gudangnya bagaimana, lokasi gudang yang jauh dari petani dan penyalur, biaya penggudangan dan uji mutu sangat tinggi, sebagian besar gudang berfungsi sebagai penyimpanan bukan untuk pemrosesan, tingginya biaya operasional yang merugikan pengelola; (3) dari sisi kelembagaan SRG: pengelola gudang yang layak terhitung terbatas, SDM pengelola gudang yang belum profesional, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan SRG; (4) dari sisi komoditas: masih terdapat disparitas harga produsen dan konsumen, aspek budidaya komoditas yang bervariasi, pengolahan pasca-panen yang berbeda-beda, dan rantai pemasaran komoditas yang bervariasi; serta (5) dari sisi kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.

Upaya mengatasi kendala realisasi dan perbaikan regulasi yang dilakukan antara lain: (1) sosialisasi SRG pada petani atau kelompok tani, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan lembaga terkait, sehingga semakin banyak debitur yang

memanfaatkan SSRG dari semula debitur pada 17 provinsi dapat meningkat debitur di 38 provinsi; (2) membangun integrasi gudang dengan pasar dengan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang terintegrasi dengan SRG; (3) penguatan kelembagaan SRG pada aspek tata kelola dan SDM; (4) meningkatkan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan SRG melalui pembentukan kelompok kerja dan program kerja SRG; (5) penguatan regulasi SSRG yang mendukung terwujudnya ekosistem usaha SRG antara lain memperluas cakupan subsidi, penambahan pembiayaan berbasis syariah, peningkatan plafon pinjaman, perpanjang jangka waktu, serta penerapan opsi penjaminan; (6) dukungan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk menghidupkan kembali SRG di kabupaten khususnya terkait percepatan pengalihan pengelolaan gudang, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan infrastruktur. Dengan adanya upaya dan perbaikan regulasi yang dilakukan seluruh pihak, Prognosis Realisasi SSRG sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan sebesar 100% yaitu Rp2,3 miliar. Lebih dari itu semua, yang diharapkan adalah ketahanan pangan dapat tercapai dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

.....



Peran APBN dalam Program/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Mochamad Faisal Syarifuddin

Direktorat Abid Ekontim

APN mempunyai peran sangat penting dalam mendukung program penyelenggaraan jalan di Indonesia. Melalui alokasi dana yang tepat, pemerintah dapat membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jalan yang lebih baik, sehingga meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan keselamatan lalu lintas. Di samping itu, APBN juga memungkinkan pemerintah untuk berinovasi dan menerapkan teknologi terbaru guna menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan dukungan pembiayaan dari APBN yang efektif, Indonesia dapat terus berkembang dan menciptakan infrastruktur jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyelenggaraan jalan dalam perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.

Program penyelenggaraan jalan di Indonesia meliputi : (i) perencanaan jalan yang terintegrasi. Pemerintah memiliki peran dalam merencanakan jaringan jalan yang terintegrasi dengan baik, menghubungkan berbagai wilayah dan sektor. Perencanaan yang matang harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan dampak lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat memprioritaskan proyek-proyek jalan yang mendukung mobilitas dan efisiensi transportasi. (ii) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan. Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan standar teknis dan keselamatan. Dengan UU Jalan yang baru, pemerintah diharapkan mengutamakan kualitas

pembangunan jalan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan jalan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. (iii) Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan seperti pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan yang jelas, dan perangkat keselamatan lainnya, pemerintah dapat mengurangi angka kecelakaan dan melindungi pengguna jalan.

Program penyelenggaraan jalan juga mengamankan (i) penyelenggaraan jalan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan membangun dan mengembangkan jaringan jalan yang efisien, masyarakat dapat dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (ii) Pengelolaan jalan tol, UU Jalan juga mengatur tentang pengelolaan jalan tol. Pemerintah berperan dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi jalan tol agar beroperasi secara efisien dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan. (iii) Penyelenggaraan jalan harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalan berlangsung secara transparan dan adil, serta memberikan kompensasi yang wajar kepada pemilik lahan yang terdampak (iv) UU jalan mendorong penerapan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan jalan. Penggunaan teknologi yang terkini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jalan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

APBN dalam mendukung Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Program penyelenggaraan jalan di Indonesia mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan jalan. Untuk merealisasikan kegiatan ini, diperlukan sumber pendanaan yang memadai. APBN berperan sebagai sumber utama pendanaan proyek-proyek jalan ini. Dana yang dialokasikan melalui APBN digunakan untuk membiayai berbagai tahapan proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan.

Melalui APBN, pemerintah dapat melaksanakan program penyelenggaraan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di berbagai wilayah Indonesia. Dengan membangun jalan yang lebih baik dan efisien, masyarakat dapat dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga memudahkan aksesibilitas dan distribusi barang dan jasa.

Secara keseluruhan program penyelenggaraan jalan, pemerintah berperan sebagai regulator, pengawas,

dan pelaksana. UU Jalan menjadi acuan utama bagi pemerintah untuk mengatur seluruh aspek terkait jalan dengan tujuan meningkatkan pelayanan jalan, keselamatan lalu lintas, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Permasalahan dan Kendala dalam Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan di Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kendala yang mempengaruhi efisiensi, keselamatan, dan kualitas jalan. Beberapa permasalahan dan kendala umum dalam penyelenggaraan jalan antara lain: Kondisi Jalan yang rusak, Kepadatan Lalu lintas, Kurangnya Anggaran, Kurangnya pemanfaatan Teknologi dan Pengadaan Lahan serta Konservasi Lingkungan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah kondisi jalan yang rusak atau buruk. Faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, intensitas lalu lintas yang tinggi, dan kurangnya pemeliharaan rutin dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan, seperti lubang atau retak. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga menjadi masalah yang umum terjadi, terutama di kota-kota besar. Tingginya jumlah kendaraan yang beroperasi dan kurangnya alternatif transportasi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang merugikan efisiensi waktu dan konsumsi bahan bakar.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas terkadang menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan jalan. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan, pelanggaran aturan lalu lintas, serta kurangnya kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan menjadi faktor penyebabnya. Teknologi yang inovatif dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam penyelenggaraan jalan. Namun, kurangnya pemanfaatan teknologi seperti sistem transportasi pintar, jaringan sensor, dan solusi digital lainnya dapat menghambat kemajuan dalam penyelenggaraan jalan

Penyelenggaraan jalan membutuhkan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan. Tidak jarang, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan yang optimal. Di bawah ini, tabel yang menjelaskan deviasi antara kebutuhan dan alokasi anggaran Preservasi Jalan di Indonesia (Sumber Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga).

Backlog Alokasi Total dan Alokasi Preservasi Jalan 2020 - 2024

		2020	2021	2022	2023
KEBUTUHAN RENSTRA 2020-2024	Alokasi Total	Rp 40,121 T	Rp 56,231 T	Rp 60,941 T	Rp 66,769 T
	Alokasi Preservasi	Rp 23,347 T	Rp 28,557 T	Rp 30,136 T	Rp 30,000 T
ALOKASI ANGGARAN	Alokasi Total	Rp 30,320 T	Rp 38,800 T	Rp 37,296 T	Rp 40,578 T
	Alokasi Preservasi	Rp 20,850 T	Rp 24,381 T (termasuk pemeliharaan tahunan 2020)	Rp 21,903 T	Rp 22,977 T
KUMULATIF BACKLOG	Alokasi Total	Rp 9,801 T	Rp 27,232 T	Rp 50,868 T	Rp 77,059 T
	Alokasi Preservasi	Rp 2,497 T	Rp 6,673 T	Rp 14,906 T	Rp 21,929 T
RATING KONDISI		2,70 / 2,66	2,63 / 2,64	2,61 / 2,59	2,57 / 2,57
KEMANTAPAN JALAN		93% / 91,3%	94% / 91,81%	95% / 92,18%	96% / 93,57%

Di samping itu, pembangunan atau perluasan jalan seringkali memerlukan pengadaan lahan dari masyarakat. Proses pengadaan lahan yang rumit, hambatan sosial, atau perbedaan pendapat dengan pemilik lahan bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.

Penanganan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan jalan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Diperlukan upaya bersama dalam pemeliharaan jalan yang rutin, peningkatan keselamatan lalu lintas, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan jaringan jalan yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Jalan melalui APBN

Pengalokasian dan penyaluran alokasi APBN untuk penyelenggaraan jalan biasanya berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional, rencana strategis pemerintah, dan kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

dana publik digunakan dengan efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan jalan dan infrastruktur umumnya disalurkan melalui berbagai jalur atau mekanisme. Berikut ini beberapa mekanisme umum yang digunakan untuk menyalurkan alokasi APBN untuk penyelenggaraan jalan.

APBN dialokasikan langsung kepada Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian/Lembaga ini bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program penyelenggaraan jalan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Alokasi Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan dan jembatan melalui PUPR, Ditjen Bina Marga.

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan TA 2021 - 2024

SD	2021				2022				2023				2024
	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI AKTUAL		PAGU INDIKATIF
RM	39.947,9	50.792,9	50.575,5	99,6%	25.018,6	40.913,0	40.184,0	98,2%	32.230,1	33.516,1	5.415,9	16,2%	31.754,2
PLN	770,9	2.370,1	2.219,0	93,6%	2.241,1	2.700,0	1.432,6	53,1%	2.091,2	3.842,5	272,3	7,1%	1.828,4
RMP	90,0	1,2	1,2	100,0%	900,0	900,0	822,4	91,4%	330,0	472,0	142,0	30,1%	878,7
SBSN	10.538,0	10.713,9	8.472,8	79,1%	9.135,9	11.256,1	9.687,4	86,1%	12.289,8	13.871,4	2.403,9	17,3%	13.232,7
JUMLAH	51.346,8	63.878,1	61.268,5	95,9%	37.295,6	55.769,1	52.126,4	93,5%	46.941,1	51.702,0	8.234,1	15,9%	47.694,0

Ket: (RM: Rupiah Murni, PLN: Pinjaman Luar Negeri, RMP: Rupiah Murni Pendamping, SBSN: Surat Berharga Syariah Negara)

Sumber: Database DJA

Dalam beberapa kasus, alokasi APBN untuk penyelenggaraan jalan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan jalan di wilayahnya. SKPD ini bertugas mengimplementasikan program-program penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pemerintah pusat. APBN juga dapat dialokasikan untuk proyek atau program penyelenggaraan jalan tertentu yang dianggap strategis, seperti pembangunan jalan tol, peningkatan jalan utama, atau pengembangan infrastruktur transportasi lainnya. Proyek dan program ini biasanya memiliki alokasi

anggaran khusus dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

Bagian dari APBN juga dialokasikan untuk Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, termasuk jalan dan jembatan yang berada di wilayah desa.

APBN juga dapat dialokasikan untuk mendukung program penyelenggaraan jalan melalui lembaga pembiayaan, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki peran dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur.

.....





Foto: Trio KD

Upaya Peningkatan Potensi PNBP Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara

Yusri Helmi
Direktorat PNBP K/L

Ditengah resiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, APBN 2023 diupayakan untuk tetap dioptimalkan sebagai *Shock Absorber*. Dalam hal APBN sebagai *Shock Absorber*, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, tentunya dituntut untuk mampu mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat, menjaga momentum pemulihan (mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan), serta menjaga belanja prioritas (penguatan produktivitas dan pondasi ekonomi).

Menyoroti Target APBN 2023

Mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya, salah satu konsolidasi dalam mengawal kualitas fiskal adalah mengembalikan defisit maksimal 3% Produk Domestik Bruto. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan telah menargetkan pendapatan negara di tahun 2023 ini sebesar Rp2.463,0 triliun yang diharapkan selanjutnya dapat terpenuhi dari pendapatan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun; pendapatan hibah sebesar Rp0,4 triliun; dan pendapatan PNBP sebesar Rp441,4 triliun.

Dalam hal capaian target pendapatan PNBP dimaksud tentunya sangat diperlukan adanya dukungan kebijakan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam/SDA, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan

aset BMN, serta penguatan tata kelola. Adapun target pendapatan PNBP sebesar Rp441,4 triliun tersebut, secara terperinci merupakan target pendapatan yang berasal dari pendapatan SDA sebesar Rp196,0 triliun; pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan/KND sebesar Rp49,1 triliun; pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp113,3 triliun; dan pendapatan Badan Layanan Umum/BLU sebesar Rp83,0 triliun.

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa optimalisasi PNBP K/L dapat diperoleh salah satunya melalui pengelolaan aset BMN. BMN atau lebih umum dikenal sebagai aset negara merupakan sumber daya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Sebagaimana amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, setiap Kementerian/Lembaga memiliki tugas untuk mengelola BMN yang ada pada unit kerjanya secara optimal, efektif dan efisien. BMN dapat pula dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan PNBP.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. BMN dari perolehan yang sah yaitu diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis, diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan kepentingan Undang-Undang, diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Pemanfaatan BMN dapat dilakukan oleh mitra yang mencakup perorangan, BUMN atau BUMD, swasta, badan usaha lain, unit penunjang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan lain sebagainya. Objek pemanfaatan BMN umumnya berupa tanah dan bangunan. Namun dalam pemanfaatannya

harus dilakukan sesuai skema yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020, pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Adapun bentuk pemanfaatan BMN yaitu: sewa (pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai); pinjam pakai (skema pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu); Kerja sama Pemanfaatan/KSP (pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP dan sumber pembiayaan lainnya); Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana dan fasilitasnya dan didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Apabila telah berakhir diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana serta fasilitasnya. Sementara untuk BSG merupakan pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana serta fasilitasnya. Tetapi, setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati); Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur/KSPI (pemanfaatan BMN dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur/KETUPI (pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN dalam rangka mendapatkan pendanaan sebagai pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya).

Langkah-langkah optimalisasi BMN pada Pengelola Barang yaitu simplikasi proses bisnis dalam pengelolaan BMN di mana perlu dilakukan penyederhanaan aturan-aturan dalam pengelolaan BMN, revaluasi BMN sekaligus memetakan BMN *idle* disertai dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN dengan mendorong peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan BMN sehingga mencegah

terjadinya penyimpangan pengelolaan BMN yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara. Sedangkan langkah-langkah optimalisasi BMN dari sisi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dimulai dari pengusulan kebutuhan BMN sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta menyusun rencana kebutuhan pengadaan BMN sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Pada saat penggunaan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang perlu memaksimalkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, melakukan pemeliharaan BMN secara memadai dengan mengutamakan prosedur pemeliharaan yang efektif dan efisien, serta melakukan pemanfaatan terhadap BMN yang *idle*. Apabila suatu BMN tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menindaklanjuti dengan pemindahtanganan.

Sekilas Data Pemanfaatan Barang Milik Negara

Mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar telah

ditetapkan bahwa pengaturan Pendapatan PNB adalah menggunakan kodefikasi 42 yang kemudian dilanjutkan untuk kodefikasi turunannya (Pendapatan SDA-421, Pendapatan KND-422, Pendapatan BLU-424, Pendapatan PNB Lainnya-425). Melalui kodefikasi 42 dimaksud akan dapat diketahui hal-hal menyangkut capaian target maupun realisasi pendapatan PNB. Dalam hal penelusuran kodefikasi pemanfaatan BMN, secara khusus, diawali dengan menggunakan kodefikasi 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN, yang selanjutnya diturunkan lagi kepada kodefikasi 42513 Pemanfaatan BMN. Sebagai contoh, perolehan data Target-Realisasi Pendapatan PNB pada tabel 1, yang kemudian di-elaborasi kepada perolehan data Target-Realisasi Pendapatan PNB Lainnya pada tabel 2, selanjutnya dirinci lagi kepada perolehan data Target-Realisasi Pendapatan PNB dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada tabel 3, sehingga dengan demikian pada akhirnya diperoleh target-realisis pendapatan pemanfaatan BMN dengan uraian sebagai berikut.

Target-Realisasi Pendapatan PNB Periode 2021-2023 (Triliun Rp)

URAIAN AKUN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
421 Pendapatan SDA	104,11	149,49	121,95	268,67	195,98	142,26
422 Pendapatan KND	26,13	30,50	37,00	40,60	49,10	60,13
424 Pendapatan BLU	58,79	126,00	78,80	89,90	83,02	39,91
425 Pendapatan PNB Lainnya	109,17	152,50	97,81	196,42	113,30	88,29
Total Pendapatan PNB	298,20	458,49	335,56	595,59	441,39	330,59
Persentase Pendapatan PNB Lainnya terhadap Total Pendapatan PNB	36,61%	33,26%	29,15%	32,98%	25,67%	26,71%

Realisasi 2023 s.d 23 Juli. Sumber BI-DJA diolah.

Target-Realisasi Pendapatan PNB Lainnya Periode 2021-2023 (Triliun Rp)

URAIAN AKUN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	23,39	41,41	20,51	85,50	38,83	27,20
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18,26	15,10	15,67	22,17	18,35	16,44
4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6,08	6,55	6,02	6,56	6,11	3,55
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4,64	4,40	4,09	4,19	4,03	2,04
4255 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27,31	27,75	27,70	27,83	29,09	10,42
4256 Pendapatan Jasa Lainnya	0,40	0,45	0,30	0,63	0,31	0,61
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	20,75	25,91	17,10	19,41	14,94	21,65
4258 Pendapatan Denda	0,02	0,66	0,04	3,04	0,03	0,64
4259 Pendapatan Lain-lain	8,33	30,27	6,38	27,09	1,61	5,73
Total Pendapatan PNB Lainnya	109,17	152,50	97,81	196,42	113,30	88,29
Persentase Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terhadap Pendapatan PNB Lainnya	21,43%	27,15%	20,97%	43,53%	34,28%	30,81%

Realisasi 2023 s.d 23 Juli. Sumber BI-DJA diolah.

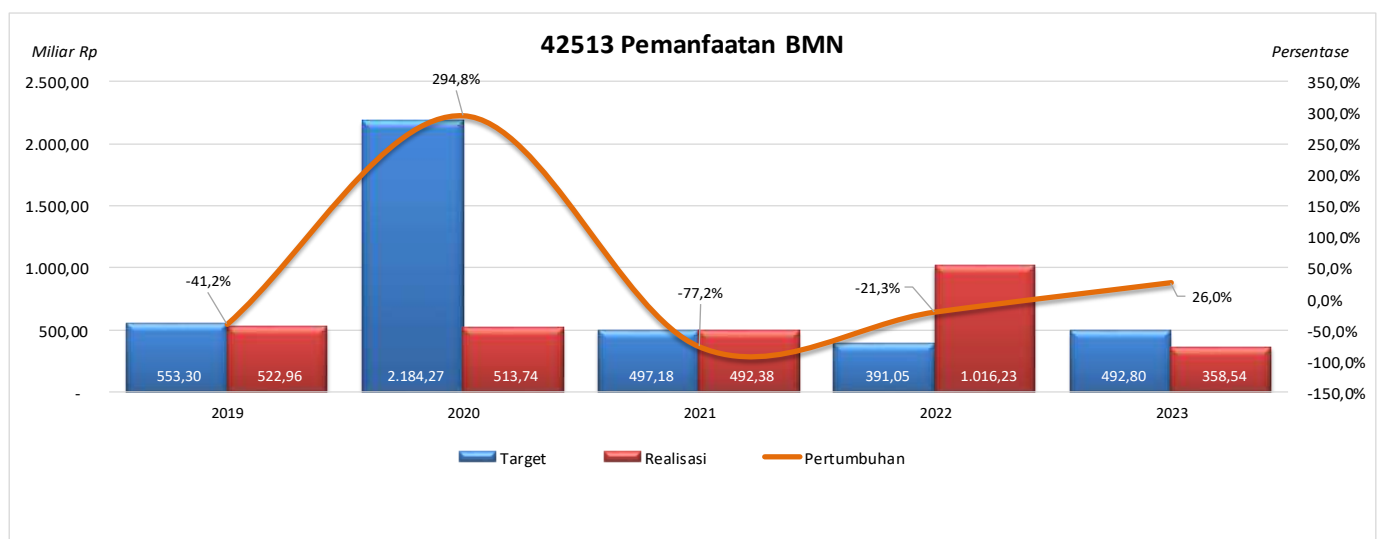
**Target-Realisasi Pendapatan PNBPN dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN,
Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Periode 2021-2023 (Triliun Rp)**

URAIAN AKUN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
42511 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	17,07	30,68	14,43	69,73	31,29	25,03
42512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,04	0,47	0,08	0,58	0,24	0,21
42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0,50	0,49	0,39	1,02	0,49	0,36
42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	0,55	0,48	0,42	0,89	0,40	0,59
42515 Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,05	0,04	0,07	0,06	0,19	0,04
42516 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4,09	8,14	4,10	11,84	5,35	0,24
42517 Pendapatan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1,09	1,10	1,02	1,39	0,86	0,78
Total 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	23,39	41,41	20,51	85,50	38,83	27,23
Prosentase Total Pendapatan Pemanfaatan BMN terhadap Total Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2,13%	1,19%	1,91%	1,19%	1,27%	1,32%

Realisasi 2023 s.d 23 Juli. Sumber BI-DJA diolah.

Di tahun anggaran 2023, dalam hal total target pendapatan negara sebesar Rp2.463,0 triliun, di antaranya sebesar Rp441,4 triliun (17,92 persen) merupakan kontribusi yang berasal dari target pendapatan PNBPN. Kemudian, dalam hal total target pendapatan PNBPN sebesar Rp441,4 triliun, di antaranya sebesar Rp113,3 triliun (25,67 persen) merupakan kontribusi yang berasal dari total target pendapatan PNBPN Lainnya. Selanjutnya, dalam hal total target pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp113,3 triliun, di antaranya sebesar Rp38,83 triliun (34,28 persen) merupakan kontribusi yang berasal dari total target pendapatan PNBPN dari Penjualan, Pengelolaan BMN,

Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN. Demikian pula dalam hal total target pendapatan PNBPN dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp38,83 triliun, di antaranya sebesar Rp492,81 miliar (1,27 persen) merupakan kontribusi yang berasal dari total target pendapatan dari Pemanfaatan BMN. Mencermati rendahnya persentase pendapatan pemanfaatan BMN dimaksud maka patut dicermati, dievaluasi dan direviu kembali latar belakang rendahnya angka tersebut dan bagaimana upaya meningkatkan kontribusi pemanfaatan BMN tersebut untuk dapat menaikkan target pendapatan PNBPN secara keseluruhan.



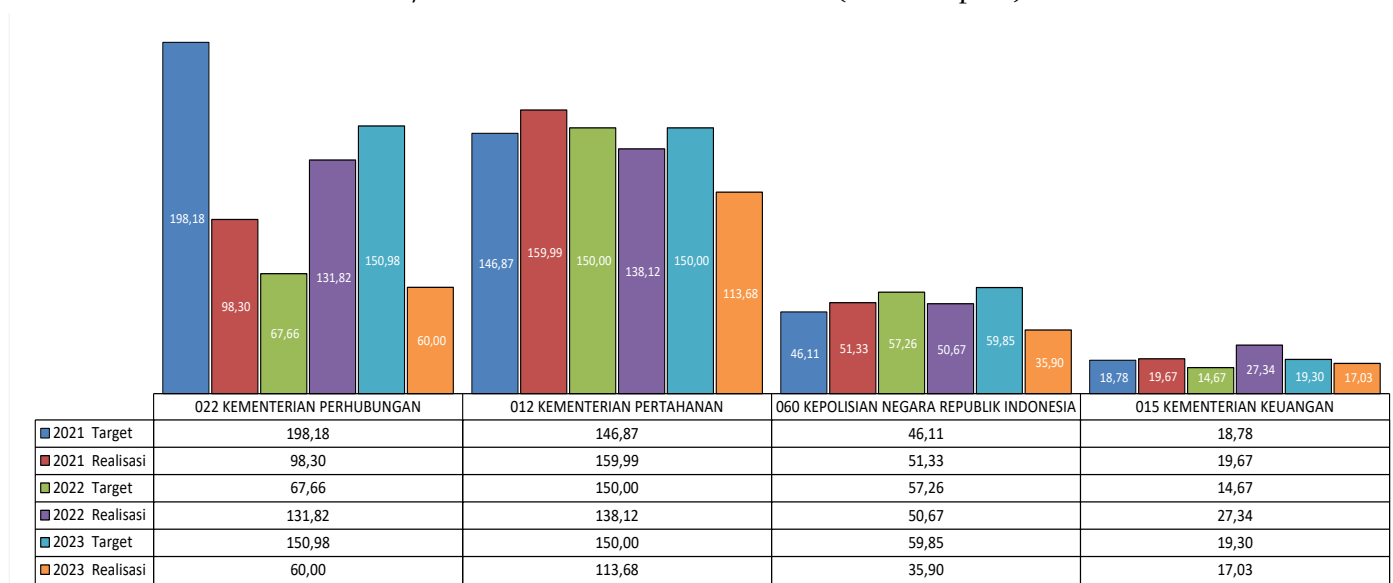
Realisasi 2023 s.d 23 Juli. Sumber BI-DJA diolah.

Berdasarkan data tren pemanfaatan BMN kurun waktu 2019-2023 terlihat cukup fluktuatif terutama di tahun anggaran 2020 silam di mana terjadi kenaikan target yang sangat tinggi namun tidak sejalan dengan realisasi yang diperoleh (dari target sebesar Rp2.184,3 miliar capaian realisasi hanya senilai Rp513,7 miliar atau sebesar 23,5 persen saja). Namun demikian, di tahun anggaran 2022 yang lalu, realisasi pemanfaatan BMN dinilai menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (dari target sebesar Rp391,1 miliar capaian realisasi senilai Rp1.016,2 miliar atau sebesar 259,8 persen). Hal tersebut menunjukkan sudah mulai terlihat adanya

pembenahan maupun penertiban pemanfaatan BMN pada seluruh instansi Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan upaya pemanfaatan BMN, tercatat beberapa Kementerian/Lembaga (Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Keuangan) dinilai telah berkinerja baik kendatipun tentunya hasil yang didistribusikan untuk mendorong pendapatan PNBPN masih harus ditingkatkan kembali dengan terus menggali potensi yang ada seiring dengan target pendapatan PNBPN yang semakin tinggi.

4 K/L Terbesar Hal Pemanfaatan BMN (Miliar Rupiah)



Realisasi 2023 s.d 23 Juli. Sumber BI-DJA diolah.



Upaya Penertiban BMN

Pengelolaan BMN membutuhkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola barang dan Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang. Siklus hidup aset dari mulai tahap *planning* hingga *disposal* membutuhkan koordinasi keduanya. Dari semua tahapan siklus tersebut, tahapan-tahapan yang secara langsung menunjang APBN adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, serta pemindahtanganan. Minimnya optimalisasi aset-aset *idle* dapat terlihat dari PNBP hasil pemanfaatan aset seperti sewa dan aktivitas pengelolaan BMN lainnya yang masih terbilang rendah dibandingkan nilai aset tetap secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan BMN adalah tidak kooperatifnya Kementerian/Lembaga untuk menyerahkan aset-aset *idle* kepada pengelola barang. Kementerian/Lembaga seringkali berupaya untuk menahan aset *idle* tersebut agar tetap dalam penguasaannya. Dampaknya, peluang untuk dilakukannya upaya pemanfaatan menjadi kecil. Dalam praktik, Kementerian/Lembaga memiliki kendali yang amat besar terhadap pengelolaan BMN yang ada dalam kekuasaannya. Pengelola barang bersifat cenderung pasif, yakni baru akan bertindak apabila terdapat permohonan dari Kementerian/Lembaga. Dominannya kewenangan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan BMN membutuhkan monitoring dan pengawasan yang memadai dari pengelola barang. Untuk mengendalikan sistem maka diperlukan upaya pemeriksaan secara rutin dan berkesinambungan. Dari semua tahap dalam siklus pengelolaan BMN, tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian merupakan faktor pengungkit yang paling tepat untuk menjaga agar Kementerian/Lembaga benar-benar mengoptimalkan BMN.

Penertiban BMN pada Kementerian/Lembaga harus dijadikan momentum bersama untuk menginventarisasi dan menata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan baik agar penggunaan dan pemanfaatan aset negara sesuai dengan peruntukannya, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan Institusi Pemeriksa/Aparat Pengawas Pemerintah juga sangat diperlukan guna menghindari adanya temuan antara lain penggunaan langsung dari PNBP pemanfaatan BMN tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya.

Mengutip sebagaimana pesan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, bahwa perbedaan negara maju dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah terletak pada asetnya. Hal ini menggambarkan masih banyak aset negara yang belum dioptimalkan untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Negara maju asetnya kerja keras sementara mereka bekerja biasa-biasa, sedangkan di Indonesia orangnya bekerja sangat keras sementara asetnya tidur". Pesan yang disampaikan Ibu Menteri kiranya dapat dijadikan suatu catatan bahwa di negara maju, segala bentuk jenis aset negara tidak ada yang dibiarkan menganggur namun semuanya dipaksa bekerja keras untuk menghasilkan nilai. Pernyataan di atas sekaligus mengkonfirmasi bahwa aset negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, aset yang termasuk dalam BMN pun harus dapat dikelola dengan baik. Tanpa pengelolaan yang baik, aset yang dimiliki tidak dapat memberikan nilai tambah, melainkan hanya menjadi monumen yang tidak bermanfaat.

.....

PMK 62 Tahun 2023, Penyempurnaan dan Simplifikasi Regulasi Tata Kelola Keuangan Negara

Riwayati dan Andryan P. Prapbano,
Dit. Sistem Penganggaran



Foto: Muchamad Irfan

Guna mendorong penyederhanaan tata kelola keuangan negara, Kementerian Keuangan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau disebut PMK Pengelolaan Anggaran. PMK tersebut disusun dengan menggabungkan 29 regulasi terkait yang ada saat ini.

Penggabungan materi muatan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan memasukkan materi muatan baru, mengubah materi muatan, dan mencabut peraturan *existing* yang terkait. Penggabungan ini diharapkan menjadi sarana untuk mengurangi tumpang tindih dan menyelaraskan proses bisnis antarperaturan.



Di samping itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada 16 Februari 2023, diperlukan penyempurnaan regulasi maupun proses bisnis mengingat dalam PP tersebut turut dimuat ketentuan baru yang memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Secara garis besar, sistematika dalam PMK 62 dibagi menjadi enam bagian besar yaitu ketentuan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan RKA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), revisi anggaran, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Kementerian/Lembaga.

Penyempurnaan ketentuan pada perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN antara lain meliputi penyempurnaan kaidah penganggaran; pencantuman prinsip belanja berkualitas; penajaman Program, Kegiatan, Keluaran setelah proses penyusunan Rencana Kerja (Renja); sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah; pengaturan mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemenuhan alokasi dasar dan pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; penyederhanaan proses untuk peningkatan kualitas Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga; serta penguatan norma standar biaya.

Terkait dengan revisi anggaran, beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PMK 62 antara lain meliputi ketentuan revisi mengenai PNBPN Otorita Ibu Kota Nusantara, sisa klaim asuransi barang milik negara tahun anggaran sebelumnya, pemenuhan kebutuhan kurang bayar pada belanja subsidi, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Otorita Ibu Kota Nusantara, mekanisme revisi anggaran antarKementerian/Lembaga, mekanisme revisi anggaran Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga ke BA BUN, mekanisme pergeseran anggaran antarsubbagian dalam BA BUN melalui Surat Penetapan Pergeseran Anggaran (SPP) antarsubbagian BA BUN,

mekanisme pergeseran anggaran antarsubbagian dalam BA BUN melalui penerbitan surat Menteri Keuangan, penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, serta pelimpahan kewenangan revisi anggaran.

Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran mengikuti ketentuan dalam PMK nomor 210/PMKK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seluruhnya dimasukkan ke dalam PMK 62 ini. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai simplifikasi proses pembayaran yang menjadi lebih ringkas namun tetap akuntabel, modernisasi proses pembayaran menggunakan dokumen elektronik dengan penyampaian melalui sistem, serta penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan. Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan diatur secara umum, sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut mengikuti peraturan teknis terkait.

Bagian pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran mengatur mengenai pengendalian dan pemantauan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan evaluasi kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Secara keseluruhan, penetapan PMK 62 ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menyelaraskan ketentuan penganggaran dengan substansi PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan peningkatan kualitas proses penganggaran;
3. modernisasi pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip *good governance* dan akuntabilitas;
4. memastikan tercapainya target *output* dan *outcome* belanja negara melalui pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja; dan
5. menyelaraskan proses bisnis sesuai dengan dinamika penganggaran dan perkembangan sistem informasi.

.....



FAMILY DAY DJA 2023

Perkuat Benteng Moral pegawai DJA
Melalui Keluarga

Family day DJA 2023 merupakan salah satu bagian dari Program Transformasi Kementerian Keuangan terkait Penguatan Lini Pertama, yaitu Manajemen Operasional pada *Three Lines of Defense*.

Kegiatan ini mengenalkan organisasi/unit, tugas dan peran orang tua/pasangan selaku pegawai Kementerian Keuangan, serta nilai-nilai integritas kepada keluarga pegawai.

Pada tahun 2023, tema yang diangkat adalah “Memulai Integritas dari Keluarga” yang utamanya bertujuan menjadikan keluarga sebagai benteng moral bagi pegawai DJA.

Thrift Shop

... and It's controversy

by Adhelia Shalsabila,
Sekretariat DJA

We all know every human's basic needs it's in the form of clothing, food, and shelter. Nowadays, these basic needs seem to be not only really needed items, but these changes are influenced by lifestyle, status, image, and honor. Developments are now very difficult to distinguish between needs and lifestyle. It was also stated that women, especially women, were not winging, they were able to increase their affairs, especially goods with specific brands or brands that were quite expensive. are brand items or famous brands for the price of 'tilted' because it is a cake or used, often called a thrift. The cost of these used goods can be very much cheaper than the price of the new brand, even though they have only been used a few times or even once. The word thrift is a familiar thing to lovers of vintage or 'old school' goods, which refers to imported used goods.

In its development, thrifting goods are no longer known as obsolete used goods. Over the past few years, the habit of hunting for used goods has become a widespread phenomenon among teenagers, adults, homemakers, and workers. Thrifting goods, especially thrift fashion with well-known brands (branded), are in great demand by various groups because the purchase price tends to be much cheaper than if purchased directly from the store. The condition of the thrift fashion products offered is very diverse, such as 50% is still in good condition, 90% is still good or like new and some even have the brand label attached,



which means that the condition is 100% still good because it has never been used or used. The better the condition of thrift fashion products, the more expensive they are. As with thrift fashion products that are rare or have high historical value, such as thrift fashion products with special materials, only produced at a particular time or period that are not reproduced, as well as thrift fashion products owned by famous celebrities or celebrities, which will usually be sold at prohibitive prices.

"Thrift fashion is actually one example of efforts in the sustainable fashion movement, but apparently it still invites pros and cons."

Some even have the brand label attached, which means that the condition is 100% still good because it has never been used or used.



Some even have the brand label attached, which means that the condition is 100% still good because it has never been used or used. The better the condition of thrift fashion products, the more expensive they are. As with thrift fashion products that are rare or have high historical value, such as thrift fashion products with special materials, only produced at a particular time or period that are not reproduced, as well as thrift fashion products owned by famous celebrities or celebrities, which will usually be sold at prohibitive prices.

On the one hand, the movement for sustainability in fashion or fashion must be supported by all parties, such as designers, manufacturers, distributors, and consumers. However, on the other hand, thrift fashion is actually prohibited. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, (Then the government regulation was updated in the Regulation No. 18 of 2021 in attachment II) concerning the Prohibition of Import of Used Clothing states that imported goods have the potential to endanger human health, so they are not safe for use and use by the public. But, is it really because of it?

Thrift locations in cities in Indonesia that are well known for thrift shops/secondhand, namely the city of Jakarta, which is in Kuitang or Pasar Senen; Tabanan- Baliter has a Frog market; Bandung has the Cimol Gedebage Market, Yogyakarta has the Awul-Awul shop on Jalan Magelang, and there are many more legendary thrift shop locations throughout the archipelago. Its existence also developed and mushroomed in small shops.



Until it finally became phenomenal, in the development of the thrift fashion business mushrooming, the demand for it was increasing, and goods became scarce in direct proportion to the increasing thrift goods prices. The appearance of thrift shops also developed, which were initially in the form of stalls only limited to ordinary shops, now there are thrift shop boutiques with air conditioning or in development there are also those located in residential homes (private rooms that magically transformed and became an online thrift shop studio) with digital marketing e-commerce or other social media such as live shopping via Shopee, Instagram, Tik-Tok and so on.

Six consumer orientations in buying used clothes, namely: frugality, style consciousness, ecological consciousness, dematerialisation, nostalgia tendency, and fashion consciousness.



The sorting of the prices of thrift goods is adjusted according to the usable quality and the brand of the goods. In some e-commerce now, there are also various shopping conveniences, in Shopee for example, there are free postage vouchers, cashback vouchers, product giveaways, and other product discounts that can attract buyers and are no longer carried around by places, considering that cargo now serves all of Indonesia.

Despite several government regulations concerning thrift shops, there is still no evident firmness, legal transparency, and no definite meeting point regarding the ban on the import of used goods due to the return to strictness and sanctions in respective regional regulations. In addition, other countries have strict rules protecting their textile products, so they are sent to countries that do not have safeguard regulations.

The weakness of shopping for used clothes (thrift shopping) is the concern for cleanliness and disease transmission, the goods are not 100% intact, and sometimes there is a lack of information about the completeness (minus) of the goods when shopping for thrift shopping online. In addition to the internal need factor, which influences people's interest, it turns out that there is also the obsession factor to continue consuming thrift shop products due to the prices of the cheap but branded goods, so they can still look classy and different from others. Meanwhile, the factor from the seller is that this thrift shop only requires a little capital but can be a fast business in the turnover of

Of course, in the end, there are positive and negative impacts from purchasing thrift fashion goods, including

(+)

- There is a positive impact in the form of cheaper clothing consumption alternatives, as well as supporting the sustainable living movement (a lifestyle that balances local and global efforts to meet basic human needs, one of which is clothing, while preserving nature from degradation and environmental damage).



- Consumer thrift fashion's thorough research on handling used goods is also one of the primary keys to thrift fashion's product's survival.
- it can reduce textile waste on earth because it is reused and thus can reduce excessive water use and reduce waste resulting from production.

(-)

- First, the existing regulation that concerning the Prohibition of Importing Used Clothing, or Export/Import Prohibited Goods emphasizes that the import of used clothing is prohibited because it will disrupt the domestic textile industry.
- Second, the ban on imports of used clothing was to reduce health and environmental problems. Imported used clothing has an impact on human health because it contains many bacteria that are harmful to health.
- Third, thrifting of imported clothing has adverse impacts, including causing severe ecological problems. Because many of these imported used clothes end up as trash in the TPA (final disposal site)



- Fourth, it has an impact on economic factors in the form of hampered customs taxes due to an increase in the smuggling of imported used clothes so that it can reduce the cost of implementing state development. Illegally imported used clothes are contraband which violates the rules. This means that these used goods do not pay Import Duty or Import Tax (PDRI) so they can cause losses to state revenues.

Anyway... However, if you really must to, here's some tips for you in taking Care of Goods from Hunting in the Thrift Shop After buying goods from a thrift shop (you should not use them immediately. However, several steps for treatment must be carried out first)



“So where are we gonna shop today?”



- Pay attention to the type of product purchased, and whether there is still a care label.
- Spray disinfectant liquid first, before handling further.
- Sort the products according to material and color. Certain clothes and clothes with specific materials and colors will cause discoloration.
- If it is a leather bag, the subsequent handling is wiping using warm water and soapy liquid little by little (but if there are stains or previous color transfers, rub using a mixture of eucalyptus oil and salt first), then clean again with a damp cloth until the soap suds gone.
- Soaking in high-temperature hot water mixed with antibacterial detergent or antiseptic soap, baking soda and vinegar. Its function is to avoid bacteria, viruses, and diseases and can clean stains.
- In addition, for stubborn stains, you can use a branded cleaner bayclin for white clothes and Vanish brand for colored garments.
- Dry the clothes where the eyes are exposed. Direct day (especially during a pandemic because the drying process can kill germs and viruses)

.....



Pendakian Gunung Ciremai: Sebuah Catatan Perjalanan

Grenada,

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

*Titik pertama puncak
Ciremai*

Berawal dari kerinduan untuk mendaki gunung, beberapa waktu lalu, saya dan sahabat saya Panji A.S memutuskan untuk membuat agenda kegiatan pendakian Gunung Ciremai.

Kemudian kami mengajak beberapa anggota DJA Mbambong untuk terlibat. Pendakian disepakati dilakukan pada tanggal 15-16 Juli 2023.

Sekilas Gunung Ciremai

Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut (MDPL), atau bahasa “gagah” di antara para pendaki, Gunung Ciremai adalah atapnya Jawa Barat. Gunung ini berlokasi di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Terdapat lima jalur pendakian, yaitu via Linggasana, Palutungan, Linggarjati, Apuy, dan Trisakti Sadarehe. Kami memutuskan untuk melakukan pendakian via Apuy, karena dianggap jalur yang paling ringan dan singkat secara waktu di antara jalur lainnya.

Sama seperti jalur lainnya, sepanjang pendakian Gunung Ciremai via Apuy sangat minim sumber air, bahkan bisa dikatakan tidak ada sumber air sama sekali. Hal ini memaksa pendaki untuk membawa perbekalan air dari Pos Pendakian dan tentu saja harus dilakukan perhitungan yang matang jumlah kebutuhan air selama pendakian, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok (memasak makanan). Ketiadaan sumber air menjadi tantangan tersendiri dalam mendaki Gunung Ciremai karena beban yang dibawa di punggung akan menjadi lebih berat. Hal inilah yang membuat kami memutuskan untuk memanfaatkan jasa tenaga tambahan (porter) untuk membantu melakukan pendakian, (selain masalah usia tentu saja, hehe).

Persiapan Fisik dan Belanja Mandatory?

Masing-masing dari kami berkomitmen untuk melakukan persiapan fisik secara mandiri. Persiapan fisik dapat dilakukan dengan melakukan jogging atau naik dan turun tangga Gedung Sutikno Slamet. Selain itu tentu saja ada budaya DJA Mbambong yang menarik dan menjadi ciri khas yaitu sebelum pendakian kami harus berbelanja dan memamerkan hasil belanjaan kami di *Whatsapp Group*. Iya, berbelanja peralatan pendakian kami jadikan agenda yang menarik karena ini merupakan salah satu upaya mendorong kami untuk melakukan persiapan yang matang dari segi lengkapnya peralatan. Lengkapnya peralatan pendakian sangat dibutuhkan karena di alam kita harus selalu siap dengan segala kondisi. Orang bijak bilang “*always prepare for the worst*”. Dengan lengkapnya peralatan dan kesiapan fisik yang matang dapat meminimalisasi dampak apabila kemungkinan buruk terjadi.

Tak kalah penting, perhitungan logistik konsumsi menjadi hal yang sangat krusial, konsumsi dapat dihitung dengan memperhatikan jumlah peserta yang ikut dan perkiraan berapa kali makan yang harus dilakukan dengan cara memasak. Terkait hal ini, kami menyerahkan anggota perempuan untuk melakukan perhitungan konsumsi dan biaya serta pemilihan menu untuk dimasak di Gunung Ciremai nanti. Berdasarkan laporan, salah satu pilihan menu yang menarik adalah rendang. Membayangkan makan rendang ditambah nasi panas yang mengepul dan suasana khas tenda yang hangat, membuat kami “ngiler” sendiri, karena tidak pernah sebelumnya kami dapat menu mewah seperti itu, biasanya ya cuma mi instant dan telur saja. Memang peran perempuan sungguh krusial!

Timeline Pendakian

Jumat, 13 Juli 2023

Pendakian diikuti oleh 10 orang, dengan komposisi 4 perempuan (Cynthia, Karin, Fortuna, dan Kamila), dan 6 laki-laki (Indrasworo, Rian Haswanda, Panji A.S, Riki dan saya sendiri).

Hari ini menjadi hari terakhir kami melakukan persiapan pendakian. Kami melakukan *checklist* peralatan baik peralatan pribadi maupun peralatan kelompok. Kami bersyukur sekali pendakian kali ini didukung sangat maksimal oleh Bapors DJA, baik dari segi perlengkapan maupun akomodasi. Keberangkatan kami lakukan pukul 17.30 dengan titik kumpul di Kantor DJA, dan beberapa orang dijemput di pintu *exit* Tol Bintara (JORR).

Setelah melalui perjalanan yang gelap, menanjak dan berliku, akhirnya sekitar pukul 21.00 kami tiba di *Basecamp* Apuy. Malam itu kami langsung bertemu porter dan melakukan koordinasi terkait teknis pendakian, tak lupa diselingi *jokes* khas pendaki lawas (kalau tidak mau dibilang *jokes* “bapack-bapack”). Suasana yang hangat ini, membuat kami segera menjadi akrab satu sama lain.

Sekitar pukul 23.00 kami memutuskan untuk beristirahat untuk menyiapkan tenaga melakukan pendakian esok harinya.

Sabtu, 15 Juli 2023

Udara dingin yang menusuk memaksa kami untuk bangun pagi ini. Di dekat *Basecamp* Apuy terdapat rumah makan yang tampak cukup ramai di pagi hari. Kami



memutuskan untuk sarapan di sana dengan menu utama nasi kuning khas Cirebonan yang rasanya sungguh lezat.

Sekitar Pukul 08.00 kami berangkat menuju Pos Pendakian Berod menggunakan kendaraan bak terbuka. Setibanya di sana kami melakukan pendaftaran ulang, sebelumnya kami sudah melakukan pendaftaran secara *online* dengan membayar PNBP sebesar Rp7.500. Di Pos ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, syukurnya kami semua dalam keadaan sehat dan dianggap layak untuk melakukan pendakian. Sebagai informasi, lokasi ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap antara lain warung, rumah makan, toilet dan musala.

Kami mulai melakukan pendakian pada pukul 09.00, setelah sebelumnya melakukan *briefing* dan berdoa bersama. Cuaca pagi ini cerah, dan hal ini menambah semangat kami, karena kami mendapatkan info beberapa hari terakhir di wilayah Majalengka sering diguyur hujan.

Pos Pendakian Berod – Pos I Arban (50 Menit)

Kontur jalur dari Pos Pendakian Berod ke Pos I Arban dapat dikatakan masih landai, di beberapa sisi masih terdapat bekas aspal yang konon katanya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, jalur ini sepertinya masih sangat mungkin dilalui kendaraan roda 2. Di Pos I ini kami istirahat sekitar 10 menit.

Pos I Arban – Pos II Tegal Pasang (75 Menit)

Dari Pos I Arban menuju Pos II Tegal Pasang yang berada di ketinggian 1.920 MDPL, jalur sudah mulai menanjak dengan kontur tanah dilengkapi akar-akar pohon yang melintang, sehingga selain fisik yang mulai dikuras, kita juga harus memperhatikan langkah kita untuk menghindari tersandung akar pohon. Namun hal yang menarik adalah perjalanan mulai dilindungi oleh pohon-pohon tinggi yang lebat daunnya, sehingga udara menjadi sangat sejuk dan kita tidak terlalu tersengat panasnya matahari. Di Pos II ini kami meluruskan kaki sekitar 15 menit, tidak perlu berlama-lama, kami melanjutkan perjalanan menuju Pos III.

Pos II Tegal Pasang – Pos III Tegal Masawa (60 Menit)

Kontur jalur menuju Pos III Tegal Masawa kurang lebih sama dengan perjalanan dari pos sebelumnya. Setibanya kami di Pos III, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang, kami memutuskan untuk makan siang di pos ini. Makan siang kami adalah makanan yang kami beli (bungkus) di warung makan tempat kami sarapan. Ini merupakan salah satu strategi untuk menghemat air selama perjalanan. Gulai ayam, ati ampela, tahu kuning, dan buntel daun singkong terasa



Pos Pendaftaran
Pada Pagi hari



Pos Pendakian Berod
(Pintu Masuk Rimba)





Kontur jalan menuju
Pos I Arban

Pos I Arban, 1.500
MDPL

Kontur Tanah dan
Akar

Pos II Tegal Pasang
1.920 MDPL

nikmat sekali kami santap, mungkin karena dilakukan bersama-sama, kita anggaplah kami melakukan *re-charge* setelah perjalanan sebelumnya dari pintu Pos Pendakian sampai Pos III ini telah menguras sebagian tenaga kami. Waktu yang kami pergunakan untuk istirahat dan makan siang di Pos III ini sekitar 30 menit.

Pos III Tegal Masawa – Pos IV Tegal Jamuju (75 Menit)

Setelah makan siang sambil bercengkrama sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Istirahat tidak bisa dinikmati lama-lama, karena dapat menyebabkan badan terasa dingin dan malas untuk bergerak. Kontur jalur menuju Pos IV Tegal Jamuju sudah mulai jarang ditemukan “bonus”. Bonus dimaksud di sini adalah jalan datar atau menurun yang secara psikologis bisa me-*refresh* pikiran kita, juga sedikit meregangkan otot-otot kaki kita. Kami tiba di Pos IV sekitar Pukul 15.15 WIB, dan beristirahat selama 15 menit.

Pos IV Tegal Jamuju – Pos V Sanghiang Rangkah (75 Menit + Menginap)

Setelah beristirahat kami melakukan perjalanan kembali menuju Pos V Sanghiang Rangkah. Pos ini mejadi tempat favorit untuk pendaki mendirikan tenda, karena terdapat lahan yang cukup luas dan bisa menampung sekitar 20 tenda. Kontur jalan menuju Pos V adalah yang paling berat dari sebelumnya. Selain soal minimnya bonus, kemiringan jalur yang hampir 50-60 derajat, memaksa kaki untuk lebih kerja keras. Kami sampai di Pos V sekitar Pukul 16.45. Total waktu perjalanan dari Pos Pendakian Berod hingga Pos V ditempuh dalam waktu kurang lebih 6,5 jam termasuk istirahat. Sama seperti pendaki lainnya, kami mendirikan tenda di pos ini, kemudian bersiap untuk menikmati istirahat ditemani hangatnya persahabatan di tengah dinginnya suhu malam hari rimba Gunung Ciremai.

Minggu, 16 Juli 2023

Pos V Sanghiang Rangkah – Puncak

Pendakian ke Puncak Ciremai (*Summit Attack*) yang berada di ketinggian 3.078 MDPL dilakukan mulai pukul 03.30 WIB dini hari. Dilakukan dini hari dengan harapan dapat melihat proses matahari terbit di puncak nanti. Sebelum berangkat dari Pos V kami mengisi perut dengan makanan ringan yang tersedia terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan sebelum berangkat berguna sebagai bekal tenaga menghadapi tanjakan-tanjakan di jalur menuju puncak. Selain itu, tak lupa kami juga membawa perbekalan makanan ringan dan air minum untuk dikonsumsi di perjalanan.



Traveling

Dalam perjalanan menuju puncak, ada 2 titik tempat yang harus dilewati sebagai patokan/penanda jalur. Patokan menuju puncak yang pertama adalah Simpang Apuy-Palutungan yang berada di ketinggian 2.828 MDPL. Simpang Apuy-Palutungan biasanya dijadikan titik kumpul (*re-group*) bagi kelompok pendaki yang ingin menuju puncak secara bersama dengan kelompoknya. Simpang Apuy-Palutungan ini merupakan titik temu antara pendaki via Apuy dan via Palutungan.

Patokan menuju puncak yang kedua adalah Goa Walet, yang berada di ketinggian 2.934 MDPL. Goa Walet memiliki lahan datar yang cukup luas. Posisi Goa Walet yang berada di antara tebing dapat meminimalisasi hembusan angin, menjadikan lokasi ini tampak cocok untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana. Namun demikian, pihak Taman Nasional Gunung Ciremai melarang pendaki untuk bermalam di area Goa Walet, hal tersebut karena dalam Goa Walet terdapat *Stalaktit* dan *Stalagmit* yang meneteskan air bercampur zat berbahaya (*Sulfatara*, *Fumarol* dan *Mofet*) sehingga apabila ada angin berhembus dari dalam Goa dapat membahayakan pendaki. Itu alasan ilmiahnya, ada juga alasan mitos yang beredar yakni Goa Walet merupakan tempat Keraton Nyi Pelet (sumber: Instagram @gunung_ciremai).

Sepanjang perjalanan menuju Puncak banyak ditemui Pohon Edelweis (*Anaphalis Javanica*), dan Cantigi (*V. Varingifolium*) yang sangat cantik dan indah. Pemandangan indah tersebut tentu saja menjadi hiburan dan penyemangat di tengah rasa kantuk dan dingin. Kontur jalan juga lebih banyak berbatu dicampur akar dan pasir yang membuat perjalanan menjadi cukup melelahkan. Untungnya kami semua melakukan pendakian menuju puncak tanpa harus membawa seluruh peralatan kami yang ditinggal di tenda Pos V. Selain itu, pemandangan langit menuju pagi menjadi hiburan tersendiri, bagi saya pribadi proses tersebut adalah hal yang ajaib ciptaan Tuhan YME, di mana terjadi mutasi warna langit dari gelap lalu jingga, hingga akhirnya biru bercahaya.



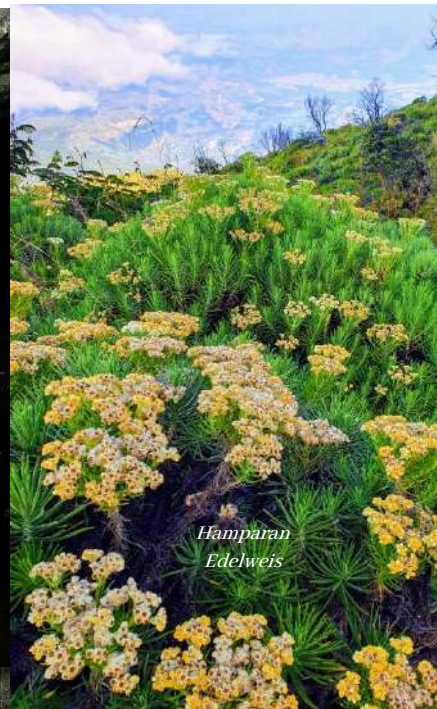
Gambaran Jalur menuju Pos IV Tegal Jamuju



Gambaran Jalur menuju Pos V



Simpang Apuy-Palutungan



Hamparan Edelweis



Goa Walet



Matahari Terbit





Puncak

Kami berhasil menjejakkan kaki di Puncak Ciremai pada Pukul 06.00, seluruh anggota kelompok berhasil sampai di Puncak. Cuaca di Puncak sangat cerah, namun demikian, karena kami berada di ketinggian lebih dari 3.000 MDPL, hembusan angin pun terasa kencang dan sangat dingin saat menyapu tubuh kami. Oleh karena itu, kami bergegas merekam dokumentasi seraya menikmati “kemenangan” perjuangan kami. Sekitar Pukul 07.30 kami memutuskan untuk langsung turun kembali ke Pos V.

Turun Ke Basecamp

Untuk sebagian pendaki, turun gunung akan terasa lebih berat daripada saat mendaki. Hal ini disebabkan ketika turun gunung, kita harus menahan beban badan dan peralatan yang kita bawa, biasanya bagian dengkul, paha, dan jari kaki yang terasa sakit. Dengan medan yang cukup curam kami menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam dari Puncak Gunung Ciremai untuk sampai di Pos V.

Sesampainya di Pos V kami langsung disuguhi sarapan yang dibuat oleh para porter. Setelah selesai “mengeksesekusi” sarapan kami segera membereskan seluruh peralatan kami untuk kemudian melakukan perjalanan turun ke Pos Pendakian Berod (Pintu Masuk Rimba).

Perjalanan turun memakan waktu lebih singkat, dengan berjalan yang relatif santai dan berhati-hati, kami sampai di Pos Pendakian Berod sekitar 3,5 jam sejak turun dari Pos V.

Di sepanjang perjalanan kami juga berpapasan dengan beberapa pendaki yang juga sedang turun dan beberapa pendaki yang baru melakukan pendakian. Tidak lupa kami menyampaikan kata-kata penyemangat “*ayo ayo, dikit lagi sampai*”. Kalimat ini biasa diucapkan oleh pendaki yang turun kepada pendaki yang sedang naik sebagai bentuk kepedulian kecil antara pendaki.

Sesampainya di Pos Pendakian Berod, petugas di Gunung Ciremai melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kami. Pemeriksaan barang bawaan bertujuan untuk memastikan tidak ada sampah yang kami tinggalkan di gunung. Kami sangat mendukung dilakukan pemeriksaan bagi setiap pendaki yang turun, hal ini sebagai upaya menjaga Kawasan Gunung Ciremai tetap bersih dan indah, sehingga kelestarian alamnya tetap terjaga. Kami mampir sebentar di warung sekitar Pos Pendakian Berod, untuk melepaskan dahaga dengan minuman yang menyegarkan, sembari memberi selamat satu sama lain, “*congrats bro, congrats sist, mantap semua, kita sudah naik dan turun gunung dengan bahagia dan selamat*”. Akhirnya sekitar pukul 17.30 kami melakukan perjalanan pulang kembali ke Jakarta.

Itulah tadi sedikit catatan perjalanan DJA Mbambong mendaki Gunung Ciremai – Jawa Barat, di perjalanan kembali ke Jakarta, meski belum hilang rasa lelah kami, sambil memejamkan mata, biasanya ada yang bertanya “*Berikutnya apa nih? kapan?*” kami silih berganti menjawab, “*gassssss ayoo, Lawu, Merbabu, Rinjani!!!*”, woowwww.



Tips dan Trik Bermain Bola Voli: Menjadi Pemain yang Lebih Unggul

Akhmad Tamzis Hudi
Sekretariat DJA

Bola voli adalah olahraga yang memadukan kecepatan, kekuatan, koordinasi, dan kerjasama tim. Bagi para pemula atau mereka yang ingin meningkatkan keterampilan bermain bola voli, ada beberapa tips dan trik yang bisa membantu Anda menjadi pemain yang lebih unggul dan berkontribusi positif dalam tim. Berikut adalah beberapa panduan yang dapat Anda terapkan:

1. Penguasaan Dasar

Sebelum mulai bermain, pastikan Anda memahami penguasaan dasar seperti teknik *servis*, *passing*, *smashing*, dan *blocking*. Latihlah gerakan-gerakan dasar ini secara konsisten untuk membangun fondasi yang kuat.

2. Latihan Kondisi Fisik

Ketahanan fisik sangat penting dalam bola voli. Latihan kardio seperti *jogging* atau bersepeda dapat membantu Anda meningkatkan daya tahan dan kecepatan. Latihan kekuatan seperti *push-up*, *sit-up*, dan *squat* akan memperkuat otot-otot yang diperlukan dalam permainan.

3. Koordinasi Mata dan Tangan

Latih koordinasi antara mata dan tangan dengan latihan *passing* dan *setting* secara rutin. Penguasaan teknik ini akan membantu Anda melakukan reaksi cepat terhadap bola.

4. Komunikasi dalam Tim

Komunikasi yang baik dalam tim adalah kunci keberhasilan. Selalu berbicara dengan rekan tim tentang rencana permainan, siapa yang akan mengambil bola, dan kapan melakukan *smash* atau *block*.

5. Posisi Tubuh yang Tepat

Pastikan tubuh Anda berada dalam posisi yang tepat saat menerima atau melepaskan bola. Posisi kaki yang kokoh dan postur tubuh yang baik akan membantu Anda melakukan gerakan dengan efektif.

6. Teknik Blok yang Efektif

Teknik *blocking* yang baik memerlukan *timing* yang tepat dan koordinasi dengan rekan tim. Fokuslah pada gerakan tangan dan posisi tubuh yang benar saat melakukan blok.

7. Fokus dan Konsentrasi

Penting untuk tetap fokus dan konsentrasi saat bermain. Jangan biarkan gangguan atau kegagalan sementara mempengaruhi performa Anda.

8. Latihan Kelompok

Berlatihlah dengan teman atau tim Anda secara teratur. Latihan kelompok akan membantu Anda memahami bagaimana berinteraksi dengan rekan tim dan merespons situasi permainan yang berbeda.

9. Analisis Permainan

Tonton pertandingan bola voli profesional atau rekam pertandingan Anda sendiri. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberi Anda wawasan tentang strategi permainan.

10. Menikmati Permainan

Terakhir, ingatlah bahwa bermain bola voli seharusnya juga tentang bersenang-senang. Nikmati setiap momen di lapangan, berikan yang terbaik, dan jangan takut untuk belajar dari kesalahan.

Ingat! Anda hanya dapat meningkatkan keterampilan bermain bola voli dan menjadi pemain yang lebih kompeten dan berkontribusi positif dalam tim dengan terus berlatih yang konsisten dan dedikasi yang tinggi.

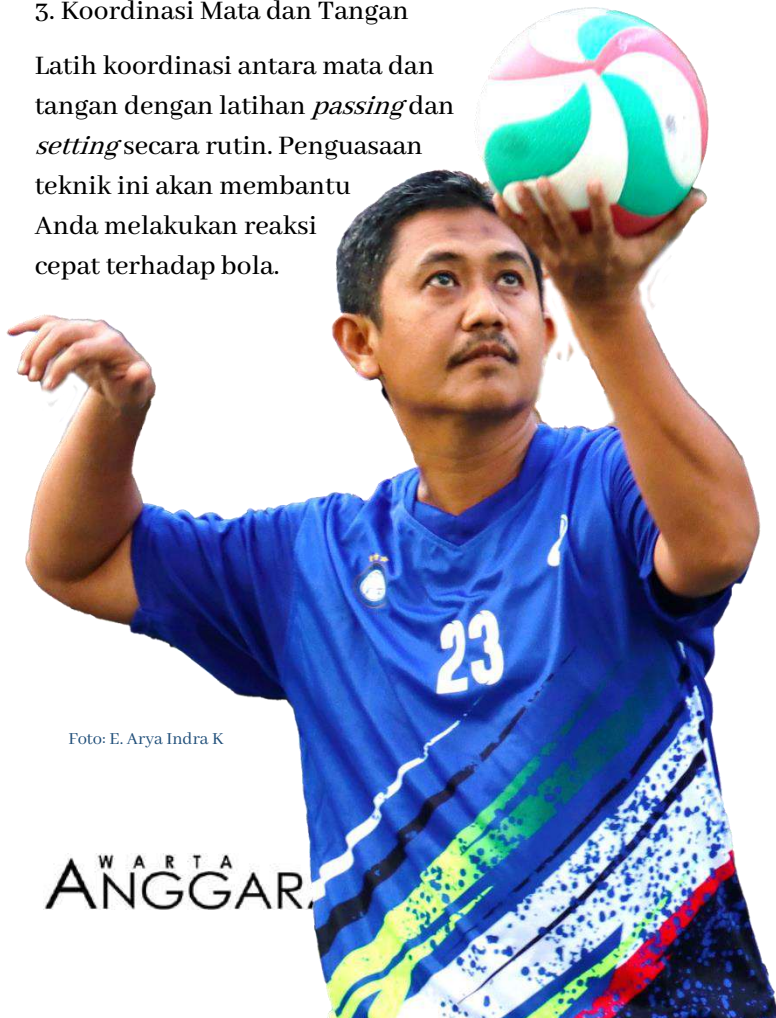


Foto: E. Arya Indra K



ASA DALAM RASA

Debu keringat ibu kota tenggelam jadi kenangan
Langit nihil polusi terbit menjadi sebuah impian
Pelangi kota baru mencipta reaksi berbeda
Bergelagat biasa atau beraksi menganalisa
Lembar rencana yang ditulis pena kebijakan
Walau dengan sedikit coretan pertentangan
Setetes tinta kejelasan mewarnai harapan
Membentuk gambar keyakinan pada sisi pemindahan
Apakah senyum mu tetap sama di zona waktu yang beda?
Akankah fajar dan senja di sana lebih menggoda?
Mungkinkah mimpi indah kita menjadi tertunda?
Aku takut akan ada jeda di antara kita
Hujan dilema membasahi keraguan
Payung hatiku kini tak cukup meneduhkan
Ku takut angin membawamu jatuh di hati lain
Ku harap doaku penyelimut hatimu yang mulai dingin
Ketika pagiku di sini cerah, malam mu di sana pun pasti indah
Raga yang pindah tak berarti hatipun harus pisah
Senandungkan nada tangis, luapkan irama amarah
Tapi jangan nyanyikan lagu untuk menyerah
Jika perjalanan ini adalah pelayaran asmara
Ku ingin segera berlabuh karena kaulah pelabuhannya
Jikalau semua ini adalah permainan rasa
Aku ingin segera menang karena dirimulah pialanya

Mayu Sara Anggita Simatupang
Sekretariat DJA



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

